

**RAJAM DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA  
(STUDI ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM ISLAM  
DAN HUKUM POSITIF)**



**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Oleh

**AHMAD SYARIF**  
**NIM: 10400112007**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2017**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : Ahmad Syarif  
Nim : 10400112007  
Tempat/ tgl. Lahir : Pulau Balang Lompo, 13 Juni 1995  
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Alamat : Pulau Balang Caddi Kab, Pangkep  
Judul : Rajam dalam perspektif Hak Asasi Manusia  
(Studi analisis perbandingan hukum Islam  
dan hukum positif)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, 24 Desember 2016

Penyusun

**Ahmad Syarif**  
**Nim: 10400112007**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Rajam dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif)” yang disusun oleh Ahmad Syarif, NIM 10400112007, mahasiswa jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqsyah* yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 M, bertepatan dengan 17 Jumadil Awal 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dan Ilmu Syari’ah dan Hukum, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 27 Maret 2017 M  
29 Jumadil Akhir 1438 H

### DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag (.....)
Sekretaris	: Dr. H. Abd Halim Talli, M.Ag (.....)
Munaqisy I	: Dr. Darsul S. Puyu, M.Ag (.....)
Munaqisy II	: Irfan, S.Ag., M.Ag (.....)
Pembimbing I	: Dr. Abdillah Mustari, M.Ag (.....)
Pembimbing II	: Dr. Achmad Musyahid, M.Ag (.....)

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag  
NIP. 19621016 199003 1 003

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”*

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt, karena dengan berkah dan limpahan rahmat serta hidayahnya, sehingga skripsi yang berjudul ***“Rajam dalam perspektif Hak Asasi Manusia (Studi analisis perbandingan hukum Islam dan hukum positif)”*** ini dapat penulis selesaikan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan suatu karya ilmiah bukanlah suatu hal yang mudah, oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan dalam penyusunan skripsi ini terdapat kekurangan, sehingga penulis sangat mengharapkan masukan, saran, dan kritikan yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai rintangan, mulai dari pengumpulan literatur, pengumpulan data sampai pada pengolahan data maupun dalam tahap penulisan. Namun dengan kesabaran dan ketekunan yang dilandasi dengan rasa tanggung jawab selaku mahasiswa dan juga bantuan dari berbagai pihak, baik material maupun moril.

Olehnya itu dalam kesempatan ini izinkanlah penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tuaku tercinta, ayahanda Abd. Syafa dan ibunda Asfuriah yang telah mencurahkan seluruh cinta, kasih sayang, cucuran keringat dan air mata, untaian doa serta pengorbanan tiada henti, yang hingga kapanpun penulis takkan bisa membalasnya. Maafkan jika ananda sering menyusahkan, merepotkan, serta melukai perasaan ibunda dan ayahanda. Keselamatan dunia

akhirat semoga selalu untukmu. Semoga Allah selalu menyapamu dengan Cinta-nya.

2. Seluruh Keluarga besar ku yang senantiasa memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan study yang telah mencurahkan kasih sayang, dorongan moril dan materi serta adik-adik yang penulis sayangi, Dia Nurul Amalia Qauliah, Nurul Amaliah Qalbiah, Wahyuni Nur dan Lutfiah Auliah, yang selalu menemani penulis dalam duka, canda dan tawa. Semoga kalian menjadi orang yang dibanggakan.
3. Bapak Prof. Dr. Musafir Pabbabari, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S1) di salah satu kampus terbesar di Indonesia Timur ini, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Bapak Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. H. Abd Halim Talli, M.Ag selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan pengembangan lembaga, Bapak Dr. Hamsir, SH.,M.Hum selaku Wakil Dekan bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Bapak Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag selaku Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan segenap pegawai Fakultas Syari'ah dan hukum yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Teruntuk Bapak Dr. Abdillah Mustari, M.Ag selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, sekaligus pembimbing dalam penulisan skripsi ini, dan Bapak Dr. Achmad Musyahid Idrus, M.Ag selaku Sekertaris jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Alauddin Makassar dan sekaligus Pembimbing dalam penulisan skripsi ini, yang selalu memberikan bimbingan, dukungan, nasehat dan motivasi demi kelancaran penyusunan skripsi ini.

6. Terutuk kepada Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh jajaran Staf Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan pengajaran dan bimbingan demi kelancaran penyusunan skripsi ini.
7. Kakanda dan Kawan-kawan seperjuangan mulai dari Angkatan 2010: kakanda Ilmy Akkas, kakanda Amril, 2011: kakanda Linggar, kakanda Firman Nurdin, 2012, 2013: Heriyanti, Juliah, A.Marlia, Nurul Quniah, Mutiah, Didi, Nunu, Rivaldi, jaja, Diwan Ridwan, Saleh, 2014 dan 2015 terkhusus Angkatan 2012 Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar: Akbar Yanlua, Abd. Mustakkim (Tetta), Zulkifli, Ridwan, Hamsir, Abd Gafur Majid, Irsan, Muh Jaya, Hatta, Ulil Amri, Dwi Yunita Davida, A.Zaqiah Saudi, Yunita Sari, Mien Trisasmata, Agusputri, Sunarti, Ismawati, Syamsi Azis dan yang penulis tidak bisa ucapkan satu persatu namanya terimakasih telah menambah cerita dan pengalaman dalam hidup yang akan selalu menjadi kenangan.
8. Kakanda dan Saudara-saudaraku, SIMPOSIUM (Sarekat Mahasiswa Penggiat Konstitusi dan Hukum): Rachdian Rakaziwi, Fachrurrozy Akmal, Akbar yanlua, Abd Gofur, Firman Rusyaid, Dayat Hanna, Muhaimin Malaba, Syaiful Haq, Muh waliyuddin, Ical, Mahdi Muhtar, A. Khaerurrijal, Adin Fatonah, Ipin, Aan, Alif dan kawan-kawan yang belum sempat saya sebutkan satu persatu namanya, kebersamaan kita merupakan hal yang terindah dan akan slalu teringat, semoga persahabatan dan perjuangan kita belum sampai disini, serta kekeluargaan yang sudah terjalin dapat terus terjaga, sukses selalu dalam meraih cita-cita dan harapan.
9. Kakanda dan Kawan-kawan HmI (Himpunan Mahasiswa Islam) Terima kasih untuk proses yang telah kita lalui bersama. Bahagia Hmi, Yakin Usaha Sampai!!!

10. Teman-Teman Keluarga FOSMADIM (Forum Silaturahmi Mahasiswa Alumni DDI Mangkoso) Terima kasih untuk proses yang telah kita lalui bersama.
11. Keluarga Besar Tamarunang mengenal kalian semua adalah anugrah bagiku.
12. Keluga Besar DDI Mangkoso: Misbahuddin Usaman, Muh Ash-habul Kahfi, Muh Zakaria, Abd Gofur, Khalif Niraldi Hamza, Basit, rijal, Mahdi, hilal, salim, Fadel, fahrul, jaelani, abdul, kacuping, Syawal dan yang tidak bisa saya tuliskan namanya satu persatu suka dan duka telah kita alami bersama tidak akan pernah terlupakan.
13. Seluruh keluarga, rekan dan sahabat yang kesemuanya tak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian studi penulis, terutama yang senantiasa memberikan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini, terima kasih.

Selain itu, penulis juga mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya jika penulis telah banyak melakukan kesalahan dan kekhilafan, baik dalam bentuk ucapan maupun tingkah laku, semenjak penulis menginjakkan kaki pertama kali di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar hingga selesainya studi penulis.

Semua itu adalah murni dari penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan dan kekhilafan. Adapun mengenai kebaikan-kebaikan penulis, itu semata-mata datangnya dari Allah swt, karena segala kesempurnaan hanyalah milik-Nya.

Akhirnya, penulis berharap bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga kesemuanya ini dapat bernilai ibadah di sisi-nya, Amin!

Sekian dan terimakasih.

***Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Samat-Gowa 24 Desember 2016

Penulis





## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Pengertian Judul.....	5
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Metodologi Penelitian.....	8
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
<b>BAB II: HAKEKAT RAJAM DALAM HUKUM ISLAM.....</b>	<b>11</b>
A. Pengertian dan Sejarah Berlakunya Hukuman Rajam.....	11
B. Dasar Hukum dan Tujuan Penjatuhan Hukuman Rajam.....	17
C. Syarat-Syarat Penjatuhan Hukuman Rajam.....	22
<b>BAB III: TINJAUAN HAM TERHADAP HUKUM RAJAM.....</b>	<b>26</b>
A. Pengertian dan Sejarah HAM.....	26
B. Kedudukan HAM dalam Islam.....	33
C. Tujuan HAM dalam Hukum Positif.....	40
D. Pandangan HAM terhadap Hukum Rajam.....	47
E. Aspek Mashlahat dan Mudharat dalam Hukum Rajam.....	50

<b>BAB IV: STUDI PERBANDINGAN HUKUM RAJAM DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF.....</b>	<b>56</b>
A. Perbedaan Pendapat dalam Hukuman Rajam Diantara Fuqaha.....	56
B. Analisis Perbandingan terhadap Hukum Rajam.....	60
1. Perspektif dalam Hukum Islam.....	60
2. Perspektif dalam Hukum Positif.....	63
<b>BAB V: PENUTUP.....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan.....	64
B. Implikasi.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>68</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>70</b>



## TRANSLITERASI

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat pada table berikut :

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	ša	š	es (dengantitikdiatas)
ج	Jim	J	je
ح	ha	h	ha (dengantitikdibawah)
خ	Kha	kh	kadan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ž	zet (dengantitikdiatas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	sy	esdan ye
ص	šad	š	es (dengantitikdibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengantitikdibawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengantitikdibawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengantitikdibawah)

ع	‘ain	‘	apostrofterbalik
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	hamzah	;	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	fathah	a	a

ا	kasrah	i	i
أ	ḍammah	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	fathāhdanyā	ai	a dan i
ؤ	fathāhdanwau	au	a dan u

Contoh:

كيف : kaifa

هول : haula

### 3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
آ... / أ....	Fathāhdanalifatauyā	ā	a dangaris di atas
ي	Kasrahanyā	ī	i dangaris di atas
و	ḍammahdanwau	ū	u dangaris di atas

Contoh:

مات : māta

رمى : ramā

قليل : qīla

يموت : yamūtu

#### 4. *Tāmarbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathāh*, *kasrah*, *danḍammah*, transliterasinya adalah (t). sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضة الاطفال : rauḍah al-aṭfāl

المدينة الفاضلة : al-madīnah al-fāḍilah

الحكمة : rauḍah al-aṭfāl

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

ربنا : rabbanā

نجينا : najjainā

الحق : al-ḥaqq

نعم : nu''ima

عدو : ‘duwwun

Jika huruf ع ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (□—), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī.

Contoh:

علي : ‘Ali (bukan ‘Aliyyatau ‘Aly)

عربي : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyyatau ‘Araby)

## 6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsyah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar ( - ).

Contoh :

الشمس : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزلافة : al-zalزالah (az-zalزالah)

الفلسفة : al-falsafah

البلاد : al- bilādu

## 7. *Hamzah.*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ( ‘ ) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تامرون : ta'murūna

النوع : al-nau'

شيء : syai'un

امرت : umirtu

#### **8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

FīZilāl al-Qur'ān

Al-Sunnahqabl al-tadwīn

#### **9. Lafz al-jalālah (الله)**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍā ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِالله dīnullāh دين الله

Adapun *tā'*marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf (t). contoh:

في رحمة الله hum fīrahmatillāh



## 10. Huruf Kapital

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap dengan huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf Adari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'an

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	: subḥānahūwata’ālā
saw.	: ṣallallāhu ‘alaihiwasallam
a.s.	: ‘alaihi al-salām
H	: Hijrah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
l.	: Lahirtahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	: Wafattahun
QS.../...: 4	: QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	: Hadis Riwayat

## ABSTRAK

**Nama : Ahmad Syarif**

**Nim : 10400112007**

**Judul : Rajam Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif)**

---

Rajam merupakan salah satu hukum yang diterapkan dan diatur dalam hukum Islam. Adapun menurut istilah bahasa Indonesia kata rajam digunakan untuk arti hukuman siksa badan karena berbuat maksiat berat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) Untuk mengetahui Hakikat rajam dalam hukum Islam, 2) Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hak Asasi Manusia terhadap hukum rajam, dan 3) Untuk Mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pelaksanaan hukum rajam.

Rajam juga merupakan hukuman yang mengutuk pelakunya dari dosa yang sangat besar untuk dicuci dan dan disucikan dari dosanya sebelum menghadap pada sang pencipta, Sebagai sumber ajaran Islam yang pertama, Alqur'an tidak pernah menetapkan hukuman rajam bagi pelaku zina *muhshan*, Alqur'an hanya memberlakukan hukuman dera atau cambuk terhadap pelaku zina, kemudian untuk pemberlakuan hukum rajam itu sendiri diatur di dalam hadist Rasulullah saw. Membahas tentang konsep persamaan hak adalah salah satu isu yang sangat menarik, di samping ia aktual karena banyaknya perhatian yang sangat besar dari berbagai pihak, ia juga sarat akan nilai-nilai kemanusiaan yang di mana harus dijunjung oleh berbagai pihak, baik itu negara, lembaga, dan tidak terkecuali pemerintah. Singkat kata, semua komunitas harus menjunjung tinggi hak asasi manusia atau nilai-nilai kemanusiaan.

Dalam teori mashlahat yaitu bertujuan untuk bagaimana bisa terjaganya nilai kesejahteraan ummat, kehidupan yang baik dan teratur. Hukum ada untuk mengatur gerak hidup manusia, yang mana manusia seperti apa yang dikatakan diatas mempunyai hak asasi, dan kewajiban asasi. Dalam teori mashlahat yaitu bertujuan untuk bagaimana bisa terjaganya nilai kesejahteraan ummat, kehidupan yang baik dan teratur. Hukum ada untuk mengatur gerak hidup manusia, yang mana manusia seperti apa yang dikatakan diatas mempunyai hak asasi, dan kewajiban asasi.

Bagi kaum intelek dan akademisi, penulis hanya mengkaji masalah hukum rajam yang diatur dalam hukum Islam dan penetangnya dalam konsep hak asasi manusia (HAM) menurut barat, namun jauh dari itu masih banyak hukum Islam yang bertentangan dengan HAM barat seperti hukum cambuk dan sanksi pidana lainnya.

Oleh karena itu penulis mengharapkan ada peneliti-peneliti yang lain yang mengkaji masalah hukum Islam yang lain yang di anggap bertentangan dengan HAM, agar masyarakat dapat membandingkan antara hukum Islam dan HAM tentang hukum yang bertentangan.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang**

Di dalam hukum pidana Islam (Jinayah) sangat diutamakan akan terciptanya perlindungan terhadap setiap individu manusia. Ketentuan pidana Islam, khususnya mengenai hudud seperti potong tangan bagi pencuri, hukum rajam bagi pezina, serta qishash, sering mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan. Ada juga yang menggambarkan hukuman tersebut sebagai suatu yang kejam dan melanggar HAM. Ketentuan-ketentuan hudud sifatnya memang mutlak (absolut), tetapi hudud mempunyai unsur dan syarat yang harus terpenuhi<sup>1</sup>.

Pada dataran realita, menunjukkan hukum pidana Islam sering terbentur dengan keadaan-keadaan yang sulit untuk didekati dengan hukum tersebut, baik itu berkaitan dengan HAM atau bahkan hukum yang dipegang oleh suatu negara yang telah ditetapkan sebagai rujukan hukum bagi semua warga negara yang bersangkutan. Termasuk penilaian-penilaian yang dilontarkan beberapa kalangan, sehingga resistensi terhadap pemberlakuan hukum pidana Islam menjadi tambah besar.

Dalam kehidupan sehari-hari suatu perbuatan yang termasuk dalam kategori delik pidana sering muncul dan senantiasa menghiasi nuansa interaksi sosial. Dalam hukum pidana Islam, melakukan perbuatan perzinahan merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang benar-benar tercela dan termasuk dalam kategori dosa yang sangat besar.

---

<sup>1</sup>.Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta : Penerbit Gema Insani ,2003), h.11.

Dengan demikian ancaman hukuman bagi pelaku perbuatan itu sangat berat, di dalam hukum Islam perbuatan seperti itu mendapat hukuman rajam dengan ditanam sampai leher kemudian dilempari pelaku dengan batu di hadapan orang banyak sampai mati, hukuman rajam itu hanya berlaku pada seseorang yang telah menikah dan melakukan perzinahan yang disebut zina *mu.h.san*, hukuman rajam sebenarnya sama dengan hukuman mati, hanya mungkin prosesnya saja yang berbeda. Sesuai dengan firman Allah dalam QS Annur ayat 2;

الرَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لِيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka derahlah tiap-tiap seseorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mecegah kamu untuk menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.<sup>2</sup>

Penjelasan ayat di atas hanya berbicara mengenai masalah hukuman cambuk (*dera*) sebanyak seratus kali bagi pelaku zina *ghairu muhshan*, dan mengenai hukuman ini bersifat umum, tanpa memandang status dan golongan, akan tetapi mengenai hukuman rajam bagi pelaku zina *muhshan* hanya diketahui dari hadis rasulullah saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ( أَنَّ رَجُلًا مِّنَ الْأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أُنْشِدُكَ بِاللَّهِ إِلَّا قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللَّهِ، فَقَالَ الْآخَرُ - وَهُوَ أَقْفَهُ مِنْهُ - نَعَمْ فَأَقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَأَدِّنْ لِي، فَقَالَ: قُلْ قَالَ: إِنَّ إِبْنِي كَانَ عَسِيقًا عَلَى هَذَا فَرَزَنِي بِإِمْرَأَتِهِ، وَإِنِّي أُخْبِرُ أَنْ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَأَقْتَدِثْ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ، فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ، فَأَخْبَرُونِي: أَمَّا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَعْرِيبُ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، الْوَلِيدَةُ وَالْعَمَمُ رَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَعْرِيبُ عَامٍ، وَاعْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمُهَا ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، هَذَا وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ

<sup>2</sup>. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: CV. Pustaka Assalam, 2010), h. 488.

Artinya:

Dari Abu Hurairah dan Zaid Ibnu Kholid al-Juhany bahwa ada seorang Arab Badui menemui Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam dan berkata: Wahai Rasulullah, dengan nama Allah aku hanya ingin baginda memberi keputusan kepadaku dengan Kitabullah. Temannya berkata -dan ia lebih pandai daripada orang Badui itu-: Benar, berilah keputusan di antara kami dengan Kitabullah dan izinkanlah aku (untuk menceritakan masalah kami). Beliau bersabda: "Katakanlah." Ia berkata: Anakku menjadi buruh orang ini, lalu ia berzina dengan istrinya. Ada orang yang memberitahukan kepadaku bahwa ia harus dirajam, namun aku menebusnya dengan seratus ekor domba dan seorang budak wanita. Lalu aku bertanya kepada orang-orang alim dan mereka memberitahukan kepadaku bahwa puteraku harus dicambuk seratus kali dan diasingkan setahun, sedang istri orang ini harus dirajam. Maka Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Demi Tuhan yang jiwaku ada di tangan-Nya, aku benar-benar akan memutuskan antara engkau berdua dengan Kitabullah. Budak wanita dan domba kembali kepadamu dan anakmu dihukum cambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun. Berangkatlah, wahai Anas, menemui istri orang ini. Bila ia mengaku, rajamlah ia." Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Muslim<sup>3</sup>.

Dari sumber kedua terbut, yaitu hadis Rasulullah saw, yang jelas menyatakan hukuman rajam bagi pelaku zina *mu.h.san*, itu sangat jarang kita temukan bahkan di negara yang di mana banyak penduduk Islam, setiap orang kemudian akan merasa takut dan tidak tega untuk menerapkan hukuman tersebut, bila yang yang dihukum rajam sampai meninggal.

Hukum pidana Islam, yang di mana sebagai realisasi dari hukum Islam itu sendiri, menerapkan hukuman tersebut dengan tujuan terciptanya kedamaian dan ketentraman individu dan masyarakat serta menghalang akan adanya perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi kehidupan individu dan masyarakat, baik itu yang berhubungan dengan jiwa, harta setara kehormatan. Tujuan pelaksanaan hukuman dalam Islam itu sendiri yaitu untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia (HAM).

Prof. Hamka dalam menanggapi masalah rajam yaitu menerima hukuman tersebut dengan alasan meskipun hukuman bagi pelaku zina *mu.h.san* tidak dijelaskan dalam ayat-ayat al-Qur'an, akan tetapi hal tersebut telah dilakukan oleh

---

<sup>3</sup> Al-Hafid Ibnu Hajar Al-Atsqalani, *Bulughul Maram* (Surabaya: Nurul Hidayah), h. 255-256.

Rasulullah dan telah dijadikan sebagai sandaran hukum oleh perawi-perawi terpercaya.

Hukuman rajam dan persoalan kemanusiaan. Konsep perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) sangat di gombor-gombarkan saat ini, bahkan pada Negara yang notabene mayoritas Islam, sehingga konsep kemanusiaan tersebut dijadikan tolak ukur dalam setiap pembetulan Undang-undang. Banyak yang beranggapan bahwa sanksi yang terkandung dalam pidana Islam sangatlah kejam dan tidak manusiawi, misalnya hukuman *qishas* yang dianggap sebagai bentuk pembalasan, hukuman potong tangan bagi pencuri, cambuk dan rajam bagi pelaku zina dan sebagainya.

Olehnya itu penyusun akan menjelaskan beberapa pendapat fuqaha dan tokoh yang mendukung penjatuhan hukuman rajam dan sebagian fuqaha yang tidak mendukung hukuman rajam. Dalam kaitanya dengan HAM disini, penyusun akan menggunakan HAM dalam deklarasi PBB yang diakui oleh dunia dan juga HAM dalam islam itu sendiri, dalam deklarasi HAM PBB di dalamnya terdapat beberapa aspek mengenai hak berbicara, berfikir, beraktifitas dan hak beragama sehingga jelas bahwa dimana letak sisi kemanusiaan dalam hukuman rajam bagi pelaku zina.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas maka yang menjadi pokok bahasan utama dalam tulisan ini adalah bagaimana rajam dalam perspektif HAM kemudian dianalisis dan dikomparasikan baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum positif, kemudian untuk lebih terarahnya tulisan ini maka dapat dikemukakan beberapa sub masalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimana hakekat rajam dalam hukum Islam.?
2. Bagaimana tinjauan HAM terhadap hukum rajam.?

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pelaksanaan rajam.?

### **C. Pengertian Judul**

Rajam adalah hukuman siksa badan<sup>4</sup> namun dalam sudut pandang yang luas rajam adalah hukuman yang ditanam sampai leher kemudian dilempari batu yang sedang sampai meninggal.<sup>5</sup> Cara menghukum seperti ini tidak dilakukan kecuali pada kasus yang sangat tercela dan hanya apabila penerima hukuman benar-benar terbukti dengan teramat menyakinkan melakukan sebuah larangan yang berat.

HAM (Hak Asasi Manusia), Hak dapat diartikan sebagai kekuasaan dalam melakukan sesuatu atau kepunyaan, sedangkan Asasi adalah hal yang utama, dasar. Sehingga hak asasi manusia atau sering disebut sebagai HAM dapat diartikan sebagai kepunyaan atau milik yang bersifat pokok dan melekat pada setiap insan sebagai anugerah yang telah diberikan oleh Allah swt.<sup>6</sup> Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang sudah dipunyai oleh seseorang sejak ia masih dalam kandungan. Hakn Asasi Manusi dapat berlaku secara universal.

Hukum Islam adalah seperangkat kaidah-kaidah hukum yang didasarkan pada wahyu Allah swt dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukallaf*<sup>7</sup> yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluk agama islam, namun dalam penafsiran lain tentang hukum Islam adalah adalah hukum yang diinterpretasikan dan dilaksanakan oleh para sahabat nabi yang merupakan hasil ijtihad dari para mujtahid dan hukum-hukum yang dihasilkan oleh ahli hukum islam melalui metode qiyas dan metode ijtihad lainnya. Hukum islam merupakan istilah khas di Indonesia, sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-islam* atau dalam

---

<sup>4</sup>. Pius A Partanto, M.Dahlan Al-Barry, *Kamus ilmiah populer* (Surabaya: Arloka, 1994), h. 650.

<sup>5</sup>. Zainuddin Ali, *Hukum pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 50.

<sup>6</sup>. woocara, <http://woocara.blogspot.com/2015/10/pengertian-ham-macam-macam-ham-contoh-pelanggaran-ham.html#ixzz4HVG9FIVd>. Akses 16 Agustus 2016.

<sup>7</sup>. Adalah orang yang sudah dapat dibebani kewajiban.



konteks tertentu dari *as-syariah al-Islamy*. Dalam wacana ahli hukum Barat istilah ini disebut *Islamic Law*.<sup>8</sup>

Hukum positif adalah hukum yang sedang berjalan atau berlaku saat ini juga pada suatu Negara. Pada tiap-tiap Negara pasti punya peraturan mengenai hukum yang diterapkan atau hukum yang dipakai itulah yang disebut dengan hukum positif.<sup>9</sup> Misalnya di Indonesia yang saat ini diberlakukan hukum KUHP perdata dan pidana, hukum ini diterapkan karena hukum ini mampu menangani segala hal kepentingan yang mencakup status agama, masyarakat, suku, bangsa, serta kebudayaan tiap-tiap negara.

#### **D. Kajian Pustaka**

Buku-Buku kajian maupun peneliti-peneliti yang membahas tentang pidana mati cukup banyak dijumpai, hanya saja dalam buku kajian tersebut lebih membahas pada sistem pelaksanaan pidana mati dalam bentuk global, yang menjadi pembahasan dalam cakupan hukum pidana mati, sama halnya dalam kajian hukum Islam pembahasan tentang pidana mati menjadi sub bahasan dalam cakupan hukum pidana Islam secara umum, yang masuk pada pembahasan fiqhi jinayah. Hanya beberapa buku yang memberikan pembahasan tentang analisa perbandingan hukum pidana mati baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum positif melalui perspektif HAM yang dijadikan sebagai tinjauan hukumnya.

Abdus Salam Arief dalam Jurnal *al-Hudud* menjelaskan bahwa eksistensi hukuman rajam dalam pidana Islam itu diakui, meskipun dalam penerapannya hukuman tersebut harus dilihat dari kasus perkasus berdasarkan kemaslahatan dan hukuman tersebut merupakan alternatif yang dapat dipertimbangkan bagi pelaku hukuman rajam.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>. Islamic law, <http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-dan-ruang-lingkup-hukum-islam.html>, Akses 16 Agustus 2016

<sup>9</sup>. <http://www.pengertianartidefinisi.com/2015/05/10/pengertian-hukum-positif/>, Akses 16 Agustus 2016.

<sup>10</sup>. Abdus Salam Arief, *Jurnal al-Hudud*, 2011/05/05 HMI jinayah Siyasah 1999, Akses 17 Agustus 2016.

Selanjutnya berkaitan dengan wacana kemanusiaan yang berkembang saat ini, perlu kiranya dikupas mengenai tinjauan nilai-nilai kemanusiaan terhadap konsep hukuman rajam dalam hukum pidana Islam. Disinilah penyusun mencoba untuk memfokuskan pembahasan dalam kajian hukuman rajam ini. Apa yang menjadi persoalan dalam wacana HAM juga menjadi perhatian penyusun, sehingga sejalan dengan wacana yang telah di paparkan diatas dan hukum rajam menunjukkan ketegasannya apakah hukum rajam bertentangan dengan HAM atau tidak.

Dalam karya ilmiah mahasiswa, menemukan beberapa karya ilmiah berupa Skripsi yang berjudul HAM dan Pidana Mati (*Studi komprehensif antara hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*) yang disusun oleh Ahmad Prasetyo, alumni Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta.<sup>11</sup> Dalam penelitian tersebut lebih menekankan pada kesesuaian antara HAM dengan Pidana Mati menurut hukum Islam dan hukum positif.

Sedangkan dalam karya ilmiah Maman Ksutiaman berupa skripsi yang berjudul *studi komparasi antara hukum islam dan hukum positif tentang pidana mati* alumni Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.<sup>12</sup> Dalam penelitian tersebut lebih menekankan pada persamaan dan perbandingan pidana mati antara hukum Islam dan hukum positif serta penjelasan mengenai beberapa tindak pidana yang terancam pidana mati.

Sementara itu, Penulis lebih memfokuskan pada bagaimana HAM melihat tentang rajam yang di mana dianggap sebagai pelanggaran HAM. Dalam penelitian ini penulis mencoba memberi gambaran tentang HAM, kemudian

---

<sup>11</sup>.Ahmad Prasetyo, *HAM dan Pidana Mati (Studi Kompratif antara hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)*, Skripsi pada JurusanPerbandingan Mazhabdan Hukum Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (Yogyakarta: 2007).

<sup>12</sup>.Maman Kustiaman, *studi komparasi antara hukum islam dan hukum positif tentang pidana mati*, Skripsi pada JurusanPerbandingan Mazhabdan Hukum Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga ( Yogyakarta: 2005).

memaparkan tentang bagaimana rajam dianggap sebagai pelanggaran HAM, selanjutnya memberi pandangan beberapa tokoh tentang bagaimana ia melihat rajam dalam dimensi Hak Asasi Manusia (HAM).

### ***E. Metodologi Penelitian***

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (Library research), yakni penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menelusuri literatur-literatur tentang hukuman rajam serta HAM.

#### **2. Sifat penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dan komparatif, yaitu penelitian yang berusaha memberikan gambaran tentang implementasi hukuman rajam dalam Islam, kemudian dianalisis dan ditinjau melalui perspektif HAM dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, selanjutnya di komparasikan dari segi persamaan dan perbedaan antara HAM baik dari segi hukum Islam maupun hukum positif.

#### **3. Pendekatan Masalah**

Dalam upaya menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam pokok masalah di atas maka peneliti menggunakan pendekatan, yaitu :

Pendekatan normatif, yakni melakukan pengamatan terhadap teks-teks al-Qur'an dan al-Hadis sebagai sumber utama dalam penetapan hukum Islam.

Pendekatan sosiologis, yaitu penelitian yang di mana objek kajiannya dilihat dari segi faktor dan implikasi implementasi rajam dalam lingkungan sosial kemasyarakatan.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam memperoleh informasi yang diperlukan terkait masalah yang diteliti seperti:

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara membaca buku kepustakaan dan literatur-literatur yang dapat dijadikan sebagai pedoman atau sumber data didalam pembuatan skripsi ini. Dengan adanya hal tersebut maka lebih mempermudah peneliti untuk mendapatkan pengertian secara umum maupun khusus tentang pokok masalah yang diteliti. Studi kepustakaan merupakan penelitian terhadap data skuder yang meliputi:

1. Data pribadi ialah data yang tersimpan di lembaga tempat dimana penulis pernah berkecimpung dalam ranah Organisasi.
2. Data publik ialah data resmi pada sebuah kepustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan perpustakaan lain, dengan mengadakan studi kepustakaan maka akan lebih memudahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

5. Analisis Data

- a. Induktif, yaitu cara berfikir untuk menemukan pemecahan masalah dari berbagai pendapat mengenai hukuman rajam, terutama kaitannya dengan HAM
- b. Deduktif, yaitu cara berfikir untuk mengambil kesimpulan yang diambil dari suatu kaidah, terutama tentang perbedaan pendapat penjatuhan hukuman rajam serta kaitannya dengan HAM didalam hukum rajam itu sendiri.<sup>13</sup>

**F. Tujuan dan Kegunaan**

Berdasarkan latar belakang dan pokok masalah diatas, maka peneliti mempunyai tujuan:

1. Untuk memberikan pemahaman dan gambaran tentang bagaimana rajam dalam Islam itu sendiri.

---

<sup>13</sup>. Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Cet. XXI; Yogyakarta: Andi Ofset, 1989), h. 36-37.

2. Untuk mengetahui tentang bagaimana eksistensi HAM dalam hukum Islam itu sendiri.
3. Untuk mengetahui terkait bagaimana tinjauan HAM terhadap hukum rajam itu sendiri.

Adapun kegunaan dari penelitian ini ialah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan tambahan pengetahuan mengenai bagaimana hukum rajam yang diatur dalam Islam.
2. Dapat dijadikan sebagai referensi bacaan bagi mahasiswa khususnya fakultas syari'ah dan hukum tentang bagaimana rajam ditinjau dalam perspektif HAM.



## BAB III

### TINJAUAN HAM TERHADAP HUKUM RAJAM

#### **A. Pengertian dan Sejarah HAM**

##### **1. Pengertian HAM**

Salah satu problem krusial dalam wacana HAM itu sendiri yang di mana sampai saat ini belum ada penyelesaiannya adalah tentang pengertian ataukah pendefinisian terhadap HAM itu sendiri<sup>1</sup>. Semua deklarasi, memorandum atau konvonen tentang HAM berupa rumusan atau pemahaman tentang hak-hak manusia. Beberapa cendekiawan mengomentari bahwasanya beberapa definisi tentang HAM itu ada yang bersifat abstrak, contoh dari keabstrakan itu ialah sebagai berikut; Maurice Cranston, filsuf politik Amerika mendefenisikan bahwasanya HAM adalah sesuatu yang melekat pada diri semua orang setiap saat<sup>2</sup>. Oleh sebab itu definisi tentang HAM itu sendiri tidak dapat diuji kebenarannya seperti kita menguji kebenaran hak yang diperoleh atau didapatkan melalui pembentukan peran-peran khusus dengan Undang-undang. Hak Asasi Manusia tidak bisa dibeli, dan pula diciptakan oleh pelaksanaan perjanjian khusus lainnya. HAM dimiliki setiap manusia dikarenakan ia benar-benar manusia.

Sementara Hedley Bull, ilmuwan politik Australia mendefenisikan Hak Asasi Manusia sebagai hak yang melekat pada diri manusia itu saja, bukan melekat pada golongan manusia ini dan itu<sup>3</sup>. Hak Asasi Manusia dipandang dimiliki oleh segenap manusia secara adil. Thomas Paine dalam *The Right of Man* menulis “HAM itu adalah hak-hak yang dimiliki oleh seseorang karena keberadaannya. Diantara hak-hak seperti ini tercakup segala hak intelektual, atau

---

<sup>1</sup> Mohammad Monib, Islah Bahrawi, *Islam dan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholis Majid* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 41.

<sup>2</sup> Mohammad Monib, Islah Bahrawi, *Islam dan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholis Majid*, h. . . 41.

<sup>3</sup> Mohammad Monib, Islah Bahrawi, *Islam dan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholis Majid*, h. . . 41-42.

hak berfikir, juga segala hak untuk bertindak sebagai individu demi kenyamanan dan kebahagiaan sendiri, asal tidak merugikan hak-hak asasi orang lain”. Inilah beberapa definisi atau pemahaman tentang makna HAM yang kita kenal dari banyak ilmuwan.

Karena begitu sulitnya mendefinisikan HAM itu, sebagian cendekiawan mengacu pada hak yang dimiliki segenap manusia, dan hak itu memiliki statusnya sendiri. Hak asasi dipandang lebih penting dari pada semua hak lainnya, atas dasar inilah sehingga mengapa disebut Hak Asasi Manusia (HAM).

Bebicara tentang definisi HAM, kita akan dibenturkan dengan berbagai perspektif dan perbedaan konsepsi tentang manusia. Definisi tentang HAM modern lebih menekankan pada kedaulatan individu, otoritas mutlak perbuatan manusia, dan kebebasannya dari apapun termasuk dari intervensi tuhan<sup>4</sup>.

Pandangan HAM barat seperti yang dikuatkan oleh Ebrahim Moosa yang mengatakan bahwa HAM dalam konteks ini (Barat) merupakan hak yang tidak dapat diganggu oleh siapa pun dengan alasan bahwa setiap individu adalah manusia yang memiliki hak mutlak<sup>5</sup>. Sebaliknya, Negara-negara dunia ketiga, khususnya negara-negara berdasarkan Islam, lebih pada mengedepankan posisi manusia berhadapan dengan hak Allah dan pemenuhan kewajiban kepadanya.

Selanjutnya dalam konteks Negara kita, KOMNAS HAM Indonesia mendefinisikan HAM sebagai berikut “Hak asasi adalah hak yang melekat pada setiap manusia untuk dapat mempertahankan hidup, harkat, dan martabatnya. Pengembangan hak tersebut dilakukan secara seimbang antara hak dan kewajiban dan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum.

---

<sup>4</sup> Mohammad Monib, Islah Bahrawi, *Islam dan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholis Majid* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 42.

<sup>5</sup> Mohammad Monib, Islah Bahrawi, *Islam dan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholis Majid*, h. . . 42.

Jadi, mengenai definisi HAM sampai saat ini belum ada consensus atau batasan pengertian yang disepakati secara universal. Belum ada definisi yang mencakup karakter manusia dari barat sampai timur, selatan sampai utara. Namun demikian, masyarakat dunia menyepakati bahwa rumusan-rumusan HAM dalam deklarasi HAM PBB dan seluruh konvensi, traktat dan perjanjian internasional lain yang menyertainya, adalah merupakan standar patokan standar pengakuan hak-hak manusia dan acuan normatif moral politik penegakan HAM di seluruh dunia.

Sementara itu Nurcholis Majid atau biasa kita kenal Cak Nur, tidak secara tegas membuat definisi tentang HAM, kecuali bahwa dia memberikan penegasan penting sebagai berikut<sup>6</sup>. Di tengah berbagai gejolak sekitar perdebatan dan perbedaan pendapat tentang esensi pokok HAM itu, beberapa hal sudah jelas, yaitu suatu pengertian tentang hak asasi manusia diperlukan sebagai ukuran minimum untuk menjamin harkat martabat seorang manusia tanpa membedakan kulturenya. Beberapa hal pokok dapat disebutkan disini, yaitu kebebasan nurani (*freedom of conscience*) yang meliputi, kebebasan beragama dan berkeyakinan, kebebasan menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat, kebebasan dari rasa takut dan dari ancaman penyiksaan, dan suatu jaminan untuk memperoleh perlakuan hukum yang adil dan tidak memihak.

Penegasan Nurcholis Majid di atas, meski tidak membuat suatu batasan atau definisi tentang HAM, jelas memuat beberapa pokok nilai HAM yang sangat mendasar, sekaligus berupa penegasan posisinya. Majid menegaskan bahwasanya nilai HAM sangat penting untuk dijadikan acuan bagi penegakan nilai-nilai kemanusiaan, suatu nilai asasi yang dimiliki tiap-tiap manusia. Menurutnya HAM dapat ditegakkan secara universal apabila setiap manusia diperlakukan sama dan

---

<sup>6</sup> Mohammad Monib, Islah Bahrawi, *Islam dan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholis Majid* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 43.



adil tanpa diskriminasi. Inilah salah satu basis dasar dalam pandangan universalisme HAM oleh Nurcholis Majid. Artinya apabila kita memperlakukan orang lain, melepaskan sekat-sekat suku, ras, jenis kelamin, warna kulit, harta, pangkat sosial politik, kebebasan dan agama, maka seorang manusia adalah manusia sama halnya dengan kita juga, pada prinsipnya manusia semua sama.

## 2. Sejarah HAM

Berbicara tentang sejarah atau asal usul lahirnya HAM menjadi sebuah perdebatan panjang namun, informasi awal yang ada bahwa sejak beberapa sebelum masehi orang sudah membicarakan tentang masalah HAM<sup>7</sup>. Hak asasi manusia jika dilihat dari sifat alamiahnya yang secara hakiki bukan sesuatu yang baru, melainkan sesuatu yang tumbuh dan berkembang yang melekat pada setiap manusia sejak ia lahir. Hak-hak tersebut melekat pada tingkat pada tingkat harkat dan martabatnya yang dimana patut untuk kita akui dan diterima, dihargai dan dihormati, bahkan untuk dilindungi dan ditegakkan dalam kehidupan, baik secara nasional maupun internasional.

Akar sejarah dari HAM itu sendiri mulai berkembang ketika orang-orang Yunani dan Romawi kuno telah mengakui eksistensi hukum kodrat. Hukum kodrat boleh kita merujuk pada setiap warga negara bila timbul konflik dikalangan mereka, hanya saja pada penanganannya biasa dirasakan terjadi ketidakadilan, hal ini disebabkan karena sistem hukum yang digunakan tidak sesuai dengan kodrat manusia sebagai makhluk tuhan yang seharusnya diatur berdasarkan hukum tuhan. Kemudian pemikiran humanis dari segala aspek perlu dipertimbangkan.

Secara historis hak asasi manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan sejarah perkembangan kehidupan manusia. Hampir seluruh pemikiran yang berkembang membenarkan pendirian atau pandangan

---

<sup>7</sup> Kurniati, *HAM Dalam Perspektif Syari'ah dan deklarasi PBB, Studi Komparatif Dengan Pendekatan Metodologi Hukum Islam* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 44.

tentang persamaan kemanusiaan yang mengakui pentingnya pencitraan bagi manusia, yakni harkat dan martabatnya yang berkaitan dengan persamaan kedudukan, kemerdekaan, dan kebebasannya. Dalam berbuat dan bertindak. Kebebasan berbuat dan bertindak seseorang dikendalikan atau batasi oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hak-hak orang lain<sup>8</sup>.

Dalam perspektif barat, umumnya berpendapat bahwa lahirnya HAM dimulai dengan lahirnya Magna Charta pada tahun 1215 di Inggris. Magna Carta antara lain mencanangkan antara lain bahwasanya raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolut (Raja yang menciptakan hukum, tetapi ia sendiri tidak terikat oleh hukum), menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat diminta pertanggung jawabannya di muka umum. Dari sinilah lahir doktrin raja tidak kebal hukum lagi dan mulai bertanggung jawab pada hukum. Sejak itu mulai diperkembangkan jikalau seorang raja melanggar hukum harus diadili dan harus mempertanggung jawabkan kebijaksanaanya kepada parlemen.

Dengan demikian, sudah mulai dinyatakan bahwa raja terikat kepada hukum dan bertanggung jawab kepada rakyat, walaupun kekuasaan membuat undang-undang pada saat itu lebih banyak ,di tangan raja. Karena itu kekuasaan raja mulai dibatasi, sebagai embrio lahirnya monarki konstitusional yang berintikan kekuasaan raja sebagai simbol belaka.

Sejalan dengan itu mulai muncul adagium yang intinya mengannnggap manusia sama di hadapan hukum (*equality before the law*), adagium ini memperkuat dorongan timbulnya negara hukum dan demoksrasi. Sebagai upaya mewujudkan semua itu, lahirlah berbagai teori dari beberapa pemikir. Misalnya Rousseau yang mempertahankan teori perjanjian masyarakat (*The Social Contract*), 1762 dalam rangka menghormati dan melindungi hak-hak individu.

---

<sup>8</sup> Ambo Asse, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Nabi Saw* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 37.

Montesquieu melakukan perubahan besar pada sistem kenegaraan perancis, yang dimana semula ia menganut sistem absolut lalu berubah menjadi sistem demokrasi yang dikembangkan melalui teori kekuasaan yang disebutnya dengan “Trias Politika” atau tiga pusat kekuasaan polit, yakni kekuasaan membuat undang-undang (legislatif) yang dilaksanakan oleh parlemen, kekuasaan melaksanakan perintah (eksekutif) yang dilaksanakan presiden bersama para mentrinya, dan kekuasaan kehakiman (yudikatif) yang dilaksanakan oleh para hakim dan penegak hukum lainnya, sehingga kekuasaan itu tidak berpusat pada satu tangan yang memungkinkan berbuat atau bertindak absolut.

Sedangkan Islam telah memperkenalkan atau mengajarkan kepada umat manusia bahwa kehidupan yang diberikan kepadanya oleh yang maha pencipta (Allah swt) adalah salah satu bentuk persamaan hak dan kemerdekaan berbuat sesuai tatanan yang diberikan melalui petunjuk wahyu yang diterima oleh Rasulullah, yakni pada saat Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib diangkat menjadi rasul pada abad ke VII M, tepatnya pada tanggal 17 Ramadhan tahun 41 dari kelahirannya yang sesuai dengan tahun 610 M<sup>9</sup>, yang di mana pada saat itu beliau menerima wahyu pertama yakni dalam QS Al-Alaq ayat 1 sampai 5;

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۚ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۚ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

Terjemahnya:

Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, bacalah, dan tuhanmu yang maha murah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam, dia mengajarkan kepada manusia apa yang diketahuinya<sup>10</sup>.

Pada ayat di atas Allah swt, telah memperkenalkan dirinya kepada manusia tentang dirinya sendiri, dan kita sebagai makhluk ciptaanya. Bahwa

<sup>9</sup> Ambo Asse, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Nabi Saw* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 42.

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: CV. Pustaka Assalam, 2010), h. 1079.

dialah yang menciptakan manusia dari tanah kemudian berproses dari air. Dialah yang menciptakan semua makhluknya, termasuk alam semesta yang di mana sebagai fasilitas bagi kehidupan manusia.

Banyak di antara firman Allah swt yang dalam Alqur'an yang diwahyukan kepada Rasulullah saw, yang menjelaskan berbagai konsep tentang kehidupan manusia, termasuk bagaimana bergaul dengan sesama manusia, di samping ayat-ayat Alqur'an, terdapat pula penegasan Rasulullah tentang hak asasi manusia ketika nabi melakukan pidato yang mana salah satu pidato Rasulullah memuat tentang hak asasi manusia (budak dan kaum buruh), "Wahai manusia! Ingatlah Allah! Berkenaan dengan agamamu dan amanatmu, Ingatlah Allah! Berkenaan dengan orang yang kamu kuasai dengan tangan kananmu (budak, buruh, dst). Berilah mereka makan seperti yang kamu makan, berilah mereka pakaian seperti pakaian yang kamu kenakan, janganlah kamu bebani mereka yang di mana beban itu mereka tidak mampu untuk memikulnya, sebab mereka adalah daging, darah dan makhluk seperti kamu! Ketahuilah, bahwa orang yang bertindak zalim kepada mereka, maka akulah musuh orang itu di hari kiamat, dan Allah adalah hakim mereka<sup>11</sup>.

Islam menempatkan hak asasi manusia sebagai konsekuensi dari pelaksanaan kewajiban terhadap Allah. Berbeda dengan masyarakat barat mereka memandang hak asasi manusia sebagai sebuah ekspresi kebebasan manusia yang di mana ia lepas dari ketentuan Allah, agama dan moral. Dalam Islam ekspresi kebebasan manusia harus di tempatkan dalam kerangka keadilan dan persamaan kedudukan dihadapan tuhan. Karena itu, tampak bahwa hak asasi manusia dalam Islam bersifat *ilahiyyah*, yakni bersumber dari Allah, sedangkan

---

<sup>11</sup> Kurniati, *HAM Dalam Perspektif Syari'ah dan Deklarasi PBB, Studi Komparatif Dengan Pendekatan Metodologi Hukum Islam* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 59.

hak asasi manusia menurut masyarakat barat lebih bersifat *insaniyyah*, dengan hanya berfokus pada manusia.

## **B. Kedudukan HAM dalam Islam**

Membahas tentang konsep persamaan hak adalah salah satu isu yang sangat menarik, di samping ia aktual karena banyaknya perhatian yang sangat besar dari berbagai pihak, ia juga sarat akan nilai-nilai kemanusiaan yang di mana harus dijunjung oleh berbagai pihak, baik itu negara, lembaga, dan tidak terkecuali pemerintah. Singkat kata, semua komunitas harus menjunjung tinggi hak asasi manusia atau nilai-nilai kemanusiaan.

Hak asasi manusia adalah hak yang di mana setiap individu yang dijamin keberadaannya dalam kehidupan masyarakat tanpa ada sekat-sekat ras, bangsa, suku, agama, jenis kelamin, dan lainnya, esensi dasar hak asasi manusia terletak pada asas persamaan manusia<sup>12</sup>. Olehnya itu setiap individu terlahir sama dan harus memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang, beramal dan berkarya.

Dari uraian di atas sudah cukup memberikan kita gambaran bahwa dalam Islam konsep persamaan bersifat *ilahiyyah*, dan diyakini pula bahwasanya sikap dan pandangan *ilahiyyah* dapat menumbuhkan sikap *insaniyyah*, dalam artian manusia yang beriman dan bertauhid adalah manusia yang berprilaku kemanusiaan, karena keselamatan harkat dan martabat manusia sangat bergantung pada komitmennya *hablum minallah wahablum minannas* secara seimbang dan sejajar.

Hubungan antara Islam dan konsep hak asasi manusia memunculkan interpretasi yang beragam terkesan menimbulkan perdebatan yang serius,

---

<sup>12</sup> Suyuti Pulungan, *Universalisme Islam* (cet. Ke 1; Jakarta: Mayo Segoro Agung, 2002), h. 157.

Supriyanto abdi mengemukakan bahwa setidaknya ada tiga variable tentang pandangan HAM dalam Islam<sup>13</sup>;

Pertama, mengemukakan bahwa Islam tidak sesuai dengan gagasan dan konsep HAM modern.

Kedua, menyatakan bahwa Islam menerima semangat kemanusiaan hak asasi manusia modern, tetapi menolak landasan sekulernya dengan mengganti landasan Islami.

Ketiga, menyatakan bahwa hak asasi manusia modern adalah khazanah kemanusiaan yang bersifat universal, dan Islam seharusnya memberikan landasan normatif dan filosofis yang kuat.

Alizabeth mayer, pengamat perilaku HAM di negara-negara Islam dalam pandangannya;

Pertama, Konsep HAM modern tidak lahir dari konstruksi budaya-budaya tradisional. Ia juga bukan produk ritual dan ibadah-ibadah keagamaan. Konsep ini lahir dari kesadaran mengenai kebebasan diri dan pembebasan manusia dari dominasi hegemoni kekuasaan Negara (*state*) yang pasca peran dunia ke II mengarah pada otoritarisme, konsep ini bertujuan luhur untuk melindungi kebebasan individual berhadapan dengan kekuatan politik. Konsep ini sama sekali tidak diformulasi untuk melindungi komunalisme apalagi bersifat kkesukuan.

Kedua, apa yang selama ini dikalaim sebagai HAM versi Islam tidak lebih dari sekedar trasnplantasi (cangkok) atau adopsi bagian-bagain HAM modern dengan ajaran Islam, dengan kata lain, konsep ini tidak benar-benar asli dari intisari ajaran Islam. Apalagi bila kita mengatakan bahwa konsep HAM itu diambil dari literatur fiqhi Islam, tentu kita telah memahami bahwa dalam tubuh Islam itu sendir kita menganut empat mazhab. Pertanyaannya, mazhab manakah

---

<sup>13</sup> Ambo Asse, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Nabi Saw* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 55.

yang dijadikan sebagai representasi dari konsep yang murni Islam? Ada pendapat bahwa kadang kala upaya pencarian HAM Islam itu sendiri dilakukan oleh rezim penguasa yang di mana sesungguhnya ia hanya menggunakan simbol keIslaman untuk mempertahankan kedudukannya.

Ketiga, konsep relativisme budaya yang dikembangkan oleh negara-negara Islam ternyata tidak lebih dari sebuah dalih yang mereka jadikan dalil untuk demi kepentingan politik belaka, fakta konkritnya, dengan mengembangkan konsep relativisme budaya, penguasa dan rezim di Iran, Arab, Saudi, Sudan, dan Pakistan akan dengan mudah menolak parameter penegakan HAM modern saat kelima Negara di atas meberanguskan musuh-musuh politiknya dengan label “anti Islam”. Negara-negara ini dengan bersandikan syariah Islam, justru dalam realitasnya memberanguskan kebebasan warga dan rakyatnya (Sesutu yang sangat tidak Islami), intinya Islam dipakai hanya sekedar alat legitimasi bagi kekuasaan<sup>14</sup>.

Hak asasi manusia dalam padangan Islam dapat dijelaskan dan kita temukan pada banyak ayat dalam Alqur'an dan hadits Nabi saw. Seperti lafal “hak” terdapat sekitar 287 kali diungkapkan dalam berbagai bentuknya<sup>15</sup>, yang di mana maknanya juga bermacam-macam, salah satu dari maknanya adalah “kebenaran”, adapun makna lainnya adalah sebuah kewenangan atau hak yang dimiliki seseorang yang wajib dilindungi oleh hukum dan oleh hak-hak orang lain.

Adapun istilah hak yang bermakna kebenaran dapat kita temukan pada beberapa firman Allah swt, diantaranya pada QS Al-baqarah ayat 147;

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ۖ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ

<sup>14</sup> Mohammad Monib, Islah Bahrawi, *Islam dan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholis Majid* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 49.

<sup>15</sup> Muhammad Fuad Abd. Baqi, *Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alafaz Al-Qur'an* (Indonesia: Maktabah Dahlan), h. 264-269.

Terjemahnya:

Kebenaran itu bersal dari tuhanmu, oleh karena itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu<sup>16</sup>.

Dari ayat tersebut, dipahami bahwa hak adalah suatu kebenaran yang berasal dari Allah yang diberikan kepada setiap ummat manusia yang harus diyakini tanpa keraguan sedikitpun. Selain itu hak juga bermakna sesuatu yang bersifat *tabi'i* atau dasar yang dibawa sejak manusia lahir dan dilindungi oleh hukum serta tidak dapat digugurkan oleh siapa pun kecuali dengan ketentuan-ketentuan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah swt.

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang wujud hak asasi manusia dalam Alqur'an maka perlu kita telusuri ayat-ayat yang berkenaan dengan eksistensi manusia di bumi, diantaranya dalam QS Al-baqarah ayat 36;

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ۖ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۖ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ

Terjemahnya;

Lalu keduanya (Adam dan Hawa) digelincirkan oleh syaitan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula dan kami berfirman; turunlah kamu! Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kedamaian di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan.<sup>17</sup>

Pada ayat tersebut Allah swt, menggunakan istilah *mustaqarrun* dan *mata'un*. Istilah atau lafal *mustaqarrun* adalah isim makan (kata benda yang menunjukkan makna tempat tinggal). Kata *qarra* dan *istaqarra* bermakna tempat tinggal, atau berdiam atau menetap.

Sedangkan lafal *mata'un* juga dalam Alqur'an bermakna pemberian kewenangan untuk memanfaatkan apa yang ada di atas bumi, pada ayat lain disebutkan *ista'mara* artinya memakmurkan, ayat ini terdapat dalam QS Hud ayat 61;

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: CV. Pustaka Assalam, 2010), h. 23.

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. . . h. 15.



وَالِى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۚ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ  
وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ

Terjemahnya;

Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata; “hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu memohonlah ampunannya, kemudian bertobatlah kepadanya, sesungguhnya tuhanku amat dekat (rahmatnya) lagi memperkenankan (doa hambanya)”<sup>18</sup>.

Ayat di atas menjelaskan bahwa kedudukan manusia sangat istimewa, yakni berwenang untuk mengurus, meramaikan, menghidupkan, membangun, menghinai bumi yang diciptakan oleh Allah swt, lalu mengurusnya dengan baik. Abd Muin Salim dalam bukunya mengemukakan bahwa ada tiga kedudukan penting bagi setiap manusia yankin; sebagai khlifah, sebagai pembangun, dan sebagai hamba atau abdi Allah swt<sup>19</sup>.

Karena itu, manusia menurut Alqur'an mempunyai kedudukan yang sangat penting dan strategis di bumi, mereka telah diberi keistimewaan dan kemuliaan melebihi makhluk yang lainnya, manusia diberikan kewenangan untuk berdomisili atau berdiam diri di atasnya dalam waktu tertentu yang telah diberikan oleh Allah swt. Bahkan manusia diberikan kekuasaan untuk mengolah sumber kekayaan alam yang ada di bumi, mengatur dan memimpin kehidupan sesuai hukum-hukum Allah swt, termasuk memiliki dan memanfaatkan kekayaan alam dalam kehidupan segala fasilitas yang di mana telah menjadi haknya.

Selain itu setiap manusia ditugaskan untuk membangun dan memajukan kehidupannya dengan memanfaatkan sumber daya alam untuk kesejahteraan umat manusia sesuai hidup ciptaannya, termasuk manusia melalui fasilitas

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. . . h. 336.

<sup>19</sup> Abd Muin Salim, *Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan (LSIK), 1994), h. 110.

sumber daya alam yang cukup potensial yang dapat diolah untuk di jadikan sebagai bahan bangunan untuk kemajuan bangsa.

Dengan demikian hak asasi manusia menurut Islam adalah sesuatu yang *ilahiyyah* dan khazanah kemanusiaan yang berdasarkan pada nilai-nilai normative dan filosofis yang kuat yang bersumber dari Alqur'an dan hadist Nabi saw, yang berjalan pada syariah dengan melalui rel *sunntullah* dan *sunnah* Rasulnya, yang di mana ditetapkan bahwa setiap manusia memiliki hak-hak dasar yang bersifat asasi yang dibawa oleh setiap insan sejak ia lahir di dunia, hal ini merupakan hak yang bersifat kodrati. Sebaliknya menurut Islam setiap orang juga memiliki kewajiban dasar yang bersifat asasi dan kodrati yakni mengakui hak-hak dasar setiap orang lain, sekaligus menghormati dan menghargainnya.

Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat yang melekat pada diri setiap orang yang merupakan esensi dan eksistensi manusia yang memiliki harkat dan martabat kemanusiaan yang patut dihargai dan dihormati. Hak asasi bagi manusia menurut pandangan Islam memiliki keistimewaan tersendiri melebihi semua teori hak asasi manusia yang ada. Diantaranya keistimewaan hak asasi manusia dalam pandangan Islam adalah;

1. Hak asasi manusia dilandaskan pada landasan atas keyakinan yang kuat dan kokoh, yaitu tegak di atas aqidah tauhid yang murni, yakni keyakinan yang membebaskan semua dari segala belenggu kekuasaan dan tekanan, baik benda alam yang dianggap memiliki kekuatan dan orang yang memiliki keperkasaan dan kelebihan yang dianggap dapat mendatangkan manfaat dan menolak bencana selain tuhan yang sebenarnya.
2. Hak asasi manusia adalah bukan pemberian dari seseorang, bukan penghargaan dari negara, melainkan adalah sebuah anugrah dan karuniah Allah swt, terhadap para hambanya sebagai hak *tabi'i* (hak-hak dasar atau

hak yang bersifat fundamental) yang melekat pada diri tiap-tiap manusia dari ia lahir sampai kembali menghadap Allah swt, bahkan orang matipun mempunyai hak dari orang yang hidup, yakni hak untu dikuburkan dan hak untuk didoakan agar diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dan ditempatkan pada tempat yang diridhainya.

3. Landasan dan sumber utama informasi terkait hak asasi manusia dalam Islam adalah Alqur'an dan hadist Nabi saw. Alqur'an dan hadits nabi saw, sangat banyak member informasi tentang bagaimana wujud hak-hak seorang dalam kehidupannya.
4. Nilai-nilai dan norma yang ditumbuhkan dalam hukum atau ajaran Islam sangat menghargai dan menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan, dengan kata lain hak asasi manusia memperoleh tempat dan perlindungan yang sangat ketat melalui aturan hukum dan ancaman atau sanksi yang ditetapkan dalam hukum Islam, seperti seorang yang membunuh akan dikenakan pula hukuman *qishas* (hukuman mati), dimaksudkan agar setiap orang tidak melakukan pembunuhan atau penganiayaan tergadap sesama manusia
5. Hak asasi manusia dalam Islam tidak bermakna kebebasan, melainkan bermakna pengakuan dan penghargaan terhadap kemerdekaan seseorang sebagai makhluk tuhan, memiliki hak yang sama dengan orang lain, dari segala aspeknya. Juga bermakna bahwa setiap manusia dapat merasakan kemuliaan dan penghargaan, sehingga tidak seorang pun yang boleh dihina, diremehkan, apalagi menyalahkan sebelum benar-benar terbukti yang bersangkutan bersalah
6. Penegakan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam Islam sangat tegas dan jelas sanksi yang diancamkan kepadda orang yang melakukan

terhadap pelanggaran hak asasi manusia, terutama terhadap lima hal yang sangat fundamental dalam hak asasi manusia itu sendiri yakni: perlindungan terhadap jiwa (hak untuk hidup dan mencari penghidupan), perlindungan terhadap hak beragama (hak atas keyakinan beragama dan hak atas perangkat keagamaan), perlindungan terhadap kehormatan (hak atas harga diri), perlindungan terhadap akal (hak untuk berkarya), perlindungan terhadap harta benda (hak atas harta milik). Karena kelima hal inilah yang merupakan hak yang paling asasi bagi tiap-tiap manusia.

7. Hak asasi seseorang akan menjadi terbatas apabila diperhadapkan dengan hak asasi orang lain<sup>20</sup>, apabila bertemu dengan norma agama, norma hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sah dalam negara.
8. Hak asasi manusia dalam syariat Islam tidak dikenal adanya kebebasan, yang ada hanyalah kewenangan yang dimiliki, kewenangan bersikap, kewenangan bertindak, kewenangan memilih atau menjatuhkan pilihan.

### **C. Tujuan HAM dalam Hukum Positif**

Hak Asasi Manusia berkembang dan dikenal oleh dunia hukum modern sekitar abad 17 dan 18 di Eropah. HAM tersebut semula dimaksudkan untuk melindungi individu dari kekuasaan sewenang-wenang penguasa (raja). Namun dalam perkembangannya HAM bukan lagi milik segelintir orang, melainkan hak semua orang (universal) tanpa terkecuali. Atas dasar kesadaran itulah dilahirkan Deklarasi Universal HAM (*Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*) tahun 1948

---

<sup>20</sup> Mislanya si A adalah seorang warga yang memiliki rumah dalam sebuah kompleks, lantas si A mengatakan saya ingin membakar rumah saya, maka si A tersebut harus dicegah, sekalipun dia beralasan bahwa ini rumah saya, ini hak saya, tidak ada alasan bagi si A untuk dibenarkan, karena jika ia membakar rumahnya maka rumah disekitarnya terancam keselamatannya atau ikut terbakar.

Dengan dituangkannya nilai-nilai HAM yang terkandung di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tersebut telah membawa konsep tatanan dalam rezim-rezim baru yang terlibat dalam pembangunan institusi maupun konstruksi demokrasi berpandangan bahwa pendidikan HAM merupakan sarana penangkal yang tepat untuk mencegah kambuhnya kembali kecenderungan pelanggaran HAM<sup>21</sup>. Di Indonesia, pemahaman HAM sebagai nilai, konsep dan norma yang hidup dan berkembang di masyarakat dapat ditelusuri melalui studi terhadap sejarah perkembangan HAM yang dimulai dari zaman pergerakan hingga sekarang, yaitu ketika amandemen terhadap UUD 1945 yang secara eksplisit memuat pasal-pasal HAM. Seperti halnya konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia (Konstitusi RIS dan UUDS 1950), UUD 1945 amandemen juga memuat pasal-pasal tentang HAM dalam kadar dan penekanan yang berbeda, disusun secara kontekstual sejalan dengan suasana dan kondisi sosial dan politik pada saat penyusunannya. Penyusunan muatan HAM dalam amandemen kedua UUD 1945 tidak terlepas dari situasi sosial dan politik yang berkembang dan nuansa demokratisasi, keterbukaan, pemajuan dan perlindungan HAM serta mewujudkan negara berdasarkan hukum.

Pengaturan HAM di Indonesia tidak hanya terbatas pada konstitusi yakni Amandemen UUD 1945, melainkan diatur juga dalam peraturan perundang-undangan sebagai peraturan pelaksana. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 8 telah menentukan dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan didasari pada materi muatan mengenai HAM.

Sebagai salah satu syarat negara hukum yang demokrasi harus ada jaminan HAM dalam konstitusi maupun dalam semua peraturan perundang-undangan.

---

<sup>21</sup> Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia* (Cet ke 2; Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, 2005), h. 2.

Jaminan HAM dalam negara meliputi sistem hukum yang dianut dan penerapannya melalui unsur-unsur dalam sistem hukum yang menurut *Lawrence Meir Friedman* (1975,1998) terdapat tiga unsur dalam sistem hukum, yakni Struktur (*Structure*), substansi (*Substance*) dan Kultur Hukum (*Legal Culture*)<sup>22</sup> Sebagai negara yang sebagian besar hukumnya dipengaruhi oleh sistem hukum *Civil Law Sistem* atau sistem Eropa Kontinental yang menghendaki hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Hal tersebut bertujuan untuk menjamin pelaksanaan asas legalitas. Prinsip-prinsip HAM harus termuat dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam proses penegakan hukum akan meminimalisir terjadinya pelanggaran HAM oleh aparat penegak hukum dan aparatur pemerintah.

Pembentukan negara adalah manifestasi keinginan untuk melindungi HAM. Sebagaimana telah dijabarkan dalam konstitusi bahwa negara memperoleh kekuasaan dari warga negara sebagai pemegang kedaulatan semata-mata untuk memenuhi dan melindungi hak asasi warga negara. Dengan demikian negara kemudian dipresentasikan oleh aparatur negara memiliki kewenangan sebagai pemberian jaminan perlindungan dan penghormatan HAM sebagai bagian hak konstitusi warga negara. Akan tetapi, alasan melindungi hak asasi, negara justru sebaliknya, seringkali mengabaikan hak-hak itu dan bahkan melanggar HAM.

Pasang surutnya HAM dalam sistem hukum di Indonesia lebih disebabkan oleh faktor sosial budaya, tendensi politik dan berbagai kepentingan individu serta kelompok yang terlalu dominan dalam terciptanya HAM di Indonesia. Dari beberapa faktor tersebut tendensi politik rezim yang berkuasa menempati posisi yang penting. Tendensi politik sangat menentukan pengakuan HAM yang

---

<sup>22</sup>Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya* (Cet ke 2; Ciawi- Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 1.

diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan dilapangan. Tendensi politik penguasa yang diformulasikan sedemikian rupa sehingga menjadi kehendak negara. Apabila sudah menjadi kehendak negara maka akan dengan mudah penguasa melalui kekuasaan yang dimilikinya membelokan kepentingan masyarakat dan menggantikannya dengan kepentingan penguasa.

Relasi yang sangat erat antara produk hukum sebagai proses politik hukum dengan kepentingan politik dalam penyusunan undang-undang di DPR. DPR yang terdiri dari beragam partai politik yang masing-masing memiliki agenda politik tertentu, yang dalam banyak proses penyusunan undang-undang digunakan sebagai kerangka berpikir dalam meloloskan suatu undang-undang. Bila undang-undang yang diajukan pemerintah tidak menguntungkan bagi mereka, mereka berupaya agar undang-undang itu diubah atau tidak diloloskan, demikian juga sebaliknya<sup>23</sup>.

Kepentingan politik penguasa dalam pembentukan suatu produk perundang-undangan terjadi hampir setiap rezim/era yang berkuasa di Indonesia. Kepentingan politik ini juga terjadi pada penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai HAM. Secara sepintas penulis akan mencoba memaparkan kondisi politik yang terjadi pada penyusunan produk perundang-undangan tentang HAM dari setiap rezim/era yang berkuasa, yakni:

Orde Lama (1945 – 1966)

Pergolakan politik yang muncul dalam penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai HAM pada awal kemerdekaan, yakni dalam penyusunan dasar negara, sistematika UUD, muatan materi, dan lain-lain. Dalam penyusunan UUD terjadi perdebatan perlu tidaknya pencantuman HAM dalam Rancangan UUD. Hasil dari rapat BPUPKI menyimpulkan bahwa pemuatan HAM dalam

---

<sup>23</sup>Imam Syaukani, A. Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 72.

UUD 1945 merupakan hasil kompromi antara pemikiran yang memandang tidak tepat memuat ketentuan HAM dalam UUD dan pemikiran yang berpendapat bahwa sudah sewajarnya UUD memuat ketentuan mengenai HAM<sup>24</sup>. Sehingga faktor politik yang dominan dalam pemuatan HAM pada awal kemerdekaan didasarkan pada ideologi antara Soepomo, Soekarno dan Hatta.

Pemikiran HAM pada awal kemerdekaan sangat kuat mempengaruhi kehidupan tatanegara Indonesia. Terutama dampak dari adanya tuduhan pihak Belanda beserta sekutu-sekutunya yang menilai Pemerintah Indonesia yang baru berdiri tidak demokratis, diktator dan merupakan boneka Jepang sehingga semakin mengentalkan pemikiran tentang HAM. HAM semakin mendapat posisi pada masa berlakunya Konstitusi RIS dan UUDS 1950. Hal tersebut ditandai dengan berdirinya partai politik dengan beragam ideologi, kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi, berlangsungnya PEMILU 1955, berjalannya fungsi DPR sebagai representasi dengan melakukan control atau pengawasan terhadap eksekutif. Faktor politik yang dominan ini tidak terlepas dari pengaruh demokrasi liberal/parlementer.

Perjalanan HAM mulai surut sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1966 dan penerapan sistem politik demokrasi dipimpin oleh Presiden Soekarno. Pada era ini, supra struktur politik maupun infra struktur politik berada dibawah kontrol/kendali dan tindakan represif presiden.

Dalam perspektif pemikiran HAM, terutama hak Sipil, sistem politik demokrasi dipimpin tidak memberikan keleluasaan terhadap kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran dengan tulisan. Pemikiran tentang HAM dihadapkan pada restriksi atau pembatasan yang ketat oleh

---

<sup>24</sup> Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2006), h. 22.



kekuasaan, sehingga mengalami kemunduran sebagai sesuatu yang berbanding terbalik dengan situasi pada masa Demokrasi Parlementer<sup>25</sup>.

#### Orde Baru (1966 – 1998)

Pergantian rezim orde lama ke rezim orde baru ternyata tidak membawa dampak besar bagi perkembangan HAM di Indonesia. Meski pada awal orde baru telah muncul wacana mengenai perlu dibentuknya pengadilan HAM pada tahun 1967. HAM mengalami kemunduran di era orde baru pada masa-masa setelah tahun 1970. Masyarakat Indonesia kembali dihadapkan pada situasi dan keadaan dimana HAM tidak dihormati, tidak dilindungi bahkan tidak ditegakkan. Hal ini disebabkan oleh pemikiran para elite kekuasaan terhadap HAM sebagai produk Barat dan bersifat Individualis. Sehingga prinsip tersebut bertentangan dengan program pemerintah orde baru yang sedang memacu pembangunan ekonomi dengan menggunakan slogan pembangunan, yang secara tidak langsung menimbulkan pemikiran bahwa segala upaya pemajuan dan perlindungan HAM dianggap sebagai penghambat pembangunan<sup>26</sup>. Pemerintah bersifat defensif yang tecermin dari berbagai produk hukum yang dikeluarkan pada orde baru, yang pada umumnya bersifat restriktif terhadap HAM. Banyaknya peristiwa pembunuhan massal, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang tanpa proses pengadilan terhadap ribuan anggota PKI dan simpatisannya pada awal pemerintahan orde baru serta masih banyak lagi pelanggaran HAM baik berat maupun ringan yang dilakukan pada saat berkuasanya orde baru.

Pemerintahan Soeharto memperkenalkan Demokrasi Pancasila yang mendasarkan pandangannya mengenai HAM dengan menggunakan konsepsi Negara Integralistik sebagaimana pernah diungkapkan Soepomo pada masa-masa

---

<sup>25</sup> Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2006), h. 40.

<sup>26</sup> Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia* . . . h. 41.

pembahasan naskah UUD, yang tampak lebih mengedepankan kewajiban daripada hak<sup>27</sup>.

Sikap pemerintah orde baru yang cenderung represif terhadap HAM, pada tahun 1993 berubah seiring dengan munculnya berbagai tekanan dari masyarakat internasional kepada pemerintah. Pengurangan tindakan represif pemerintah ditandai dengan adanya pembatasan penggunaan UU Subversi, pendirian Komna HAM (meskipun hanya dengan berdasarkan Keppres), pendirian lembaga-lembaga pengawas pemilihan umum, namun lembaga pemantauan pemilu adalah lembaga asing.

Perubahan perilaku dan retorika Pemerintah dalam bidang HAM mulai tampak terlihat ditandai dengan sikap yang lebih kooperatif dan mulai diterimanya standar HAM internasional dalam berbagai konvensi internasional HAM yang diikuti oleh Indonesia. Diakhir masa pemerintahan orde baru, konsep pemikiran HAM tampaknya mulai bergeser dari partikularisme ke arah universalisme.

Reformasi (1998 – sekarang)

Pada era reformasi ini, telah terjadi pengkajian ulang terhadap kebijakan-kebijakan serta pengaturan perundang-undangan yang berkaitan dengan HAM. Pemerintah telah menerima norma-norma internasional, baik melalui ratifikasi maupun institusionalisasi norma-norma HAM internasional ke dalam sistem hukum nasional. Telah tumbuhnya pemahaman dan kesadaran bahwa sesungguhnya HAM sebagai hak dasar yang ada pada setiap manusia bukanlah sesuatu hal yang baru, serta tumbuhnya keinsyafan bahwa HAM merupakan suatu tuntutan yang berhak dituntut diperjuangkan dan dipertahankan untuk dijamin, dilindungi dan dihormati.

---

<sup>27</sup> Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. . . h. 49.

Pelaksanaan asas demokrasi yang baik dalam era reformasi ini membawa pengaruh besar bagi perkembangan HAM di Indonesia. Demokrasi yang berintikan kebebasan dan persamaan sering dikaitkan dengan berbagai unsur dan mekanisme. Demikian pula paham negara berdasarkan atas hukum. Salah satu ciri unsur itu adalah jaminan perlindungan dan penghormatan terhadap HAM. Jaminan, perlindungan dan penghormatan HAM tidak mungkin tumbuh dan hidup secara wajar apabila tidak ada demokrasi dan tidak terlaksananya prinsip-prinsip negara berdasarkan atas hukum. Sehingga hubungan antara HAM, demokrasi, dan prinsip-prinsip negara berdasarkan atas hukum harus dilihat dalam hubungan keseimbangan yang simbiosis mutualistik.

#### ***D. Pandangan HAM terhadap Hukum Rajam***

Bagi banyak negara larangan penyiksaan itu sendiri dapat diterima, ada diskusi yang di mana masih berlangsung tentang lingkup defenisi penyiksaan itu sendiri, untuk beberapa negara terdapat sebuah hirarki latin yang memandang penyiksaan merupakan tindakan yang paling keji dan tunduk pada larangan mutlak, sementara itu adalah bagian dari suatu perlakuan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat.

Di dalam regional pada mulanya tampak keengganan untuk mengutuk kegiatan negara sebagai penyiksaan dengan alasan politik dan diplomatik, perbuatan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat seringkali lebih disukai.

Adapun kandungan tentang larangan penyiksaan atau perlakuan hukuman yang lain dan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat terdapat dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 7 DUHAM yang berisi<sup>28</sup>:

---

<sup>28</sup> Ahmad Kosasih, *HAM dalam Perspektif Islam Menyikapi Persamaan dan Perbedaan antara Islam dan Barat* (Jakarta: Salembah Diniyah, 2003), h. 183.

Tidak seorang pun dapat dikenai penyiksaan, atau perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat khususnya, tidak seorang pun dapat dijadikan objek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuannya.

Larangan atas penyiksaan cukup mapan dan dianggap sebagai norma mutlak hukum internasional. Konvenant internasional tentang hak sipil dan politik tidak mendefenisikannya penyiksaan, tetapi pasal 1 ayat (1) konvensi menentang penyiksaan dan bentuk perlakuan dan hukuman lainnya yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat<sup>29</sup>.

Ketentuan hukuman rajam berlawanan antara lain dengan:

1. Deklarasi Umum HAM (DUHAM).
2. Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.
3. Konvensi Hak Sipil dan Politik dan UUD 1945

Ancaman hukuman rajam dengan apa yang ada diatas, apabila kemudian dieksekusi maka akan mengakibatkan sebuah masalah dalam hal bahwa eksekusi itu harus berakibat kepada pelukaan dan menyiksa, dan kemudian dilakukan dengan cara-cara yang tidak semua orang mungkin akan mampu melihatnya pada situasi di masa kini. Sedangkan hukuman mati berlawanan dengan DUHAM menyatakan:

- a. Hak hidup adalah hak asasi (Pasal 3 DUHAM: setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu)
- b. Hak hidup sebagai hak asasi juga disebutkan dalam konvensi Hak Sipil dan Politik (pasal 6: setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat

---

<sup>29</sup> Lihat pasal 7 ayat (2), butir (E) tentang Statuta Mahkamah Pidana Internasional, 17 juli 1998.

pada dirinya. Hak ini wajib untuk dilindungi oleh hukum, dan tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang).

- c. Dalam UUD 1945, hak untuk hidup juga diakui (pasal 28A: setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya, kemudian dalam pasal 28I: hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, adalah hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun).

PBB juga telah mengeluarkan protokol tambahan tentang penghapusan hukuman mati namun meskipun Indonesia sudah mengadopsi Konvenan Hak Sipil dan Politik, Indonesia tidak turut meratifikasi protocol tersebut, karena beberapa UU masih mencantumkan hukuman mati. Di samping itu, hukuman mati juga dilarang dalam konvensi eropa untuk bagaimana dijadikan sebagai perlindungan HAM dan kebebasan mendasar dalam satuta Roma tentang *International Criminal Court*, yang di mana juga bersumber dari nilai-nilai yang di akui secara internasioal<sup>30</sup>.

Sampai sekarang penjatuhan hukuman mati masi tetap menjadi suatu hal begitu controversial, melanggar HAM dank arena itu banyak yang menentanginya, sudah ada beberapa negara yang telah menghapus hukuman mati, namun ternyata masih banyak pula negara yang mencantumkan hukuman mati dalam UU mereka. Seluruh negara di Benua Eropa telah menghapus hukuman mati. Namun di Amerika Serikat beberapa negara bagian masih menerapkan hukuman mati. Hukuman mati juga diterapkan di Malaysia, Singapura, Vietnam, Jepang, Arab dan lain-lain.

Di Indonesia dikenakan terhadap pelaku kejahatan jenis tertentu seperti terorisme, narkoba dan pembunuhan berencana. Eksekusi hukaman mati di Indonesia dilakukan dengan cara menembah terhukum sampai mati. Karena

---

<sup>30</sup> Ian Brownlie, *Dokumen- Dokumen Pokok Mengenai Hak Asasi Manusia* (Jakarta: UI Press, 1993), h. 77.

dianggap melanggar melanggar UUD 19945 yang di mana mengakui hak untuk sebagai hak asasi, maka pernah dilakukan *judicial review* terhadap ancaman hukuman mati dalam UU narkotika. Namun Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa hukuman mati di Indonesia tidak melanggar konstitusi sebab hukuman itu ditujukan untuk menghormati hak orang lain.

#### **E. Aspek Masalahat Mudharat dalam Hukum Rajam**

##### **1. Aspek Mashlahat dalam Hukum Rajam**

Dalam teori mashlahat yaitu bertujuan untuk bagaimana bisa terjaganya nilai kesejahteraan ummat, kehidupan yang baik dan teratur. Hukum ada untuk mengatur gerak hidup manusia, yang mana manusia seperti apa yang dikatakan diatas mempunyai hak asasi, dan kewajiban asasi. Apabila seorang tidak menjalankan kewajibannya akan berakibat hilangnya sebuah hak, bahkan dapat menimbulkan kerusakan pada yang lain. Dalam pandangan saya hukum dapat melahirkan dua nilai, yaitu nilai kemashlahatan dan nilai kerusakan, dalam artian suatu hukum yang baik akan melahirkan kemashlahatan begitupun sebaliknya suatu hukum yang tidak baik akan menimbulkan kerusakan. Maka diantara dua efek dari hukum itu sendiri harus didahulukan tingkat kerusakan yang akan terjadi pada masyarakat ketimbang harus mengambil langkah mashlahat, karena tingkat kerusakan lebih berbahaya makanya harus diantisipasi sebelumnya. Yang mesti ditekankan bagi para pemimpin nergara bahwasanya tingkat kemashlahatan itu akan tercapai apa sudah terhindar dari kerusakan, maka suatu hukum belum dianggap sebuah mashlahat apabila menimbulkan sebuah kerusakan<sup>31</sup>.

Selain itu juga hukum rajam adalah hukuman yang di mana bisa menutup atau membendung untuk terbukanya pintu-pintu kerusakan yang terjadi akibat

---

<sup>31</sup> Ahmad Kosasih, *HAM Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h. xxiv

pelanggaran dan kemaksiatan<sup>32</sup>. Antisipasi dalam hal penanggulangan tersebut sangat dianjurkan oleh ulama fiqhi sebagai tanda kekhawatiran pemimpin atau masyarakat akan kerusakan yang akan menimpa jika tidak segera di ambil tindakan hukum yang membuat jera, maka hukum rajam adalah salah satu bentuk hukuman yang dapat memberikan jera bagi masyarakat.

Maka dalam hal ini hukum Islam menetapkan untuk mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran, kerusakan pada masyarakat umum, kepentingan social harus lebih dahulu diutamakan atas kepentingan individu. Hukum rajam adalah hukuman maksimal yang ada pada hukum Islam. Hukuman tersebut adalah hukuman yang diadopsi dari hukum tuhan pada agama lain sebelum Islam yang secara turun temurun ada pada kitab-kitab samawi. Maka jelas bahwa hukum rajam adalah hukum tuhan yang telah ditetapkan bagi hambanya yang mengimaninya, hukum rajam ditetapkan adalah sebagai lambing bahwa betapa banyak akan kerusakan yang akan timbul akibat perzinahan yang dilakukan secara bebas. Banyak dampak buruk yang akan menghancurkan pilar-pilar kehidupan jika perilaku zina membumi. Maka dengan kata lain bentuk tujuan pidana rajam adalah kemaslahatan manusia dalam hidup jasmani dan rohani dalam rangka memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta<sup>33</sup>.

Hukum rajam tersebut bertujuan untuk mengingat dampak nagtifnya dari perbuatan zina:

- a. Menyebarkan penyakit kelamin
- b. Enggan melakukan pernikahan
- c. Mengganggu keharmonisan rumah tangga karena ketidak puasan dalam hubungan seksual

---

<sup>32</sup> Ahmad Kosasih, *HAM Dalam Perspektif Islam*. . . h. 39

<sup>33</sup> Hamka Haq, *Filsafat Ushulfiqhi* (Makassar: Yayasan Al-Ahkam, 1998), h. 68.

Hukum rajam adalah hukuman yang dapat membendung angka kerusakan yang terjadi pada masyarakat, karena pidana tersebut sangat mengancam bagi para pelakunya dan membuat orang takut atau enggang untuk melakukan perzinahan *muhshan*, tentu saja jika seorang takut akan jenis hukuman ini, maka masyarakat aman karena angka perzinahan semakin sedikit, dan jika perzinahan sudah tidak lagi dilakukan maka sedikit peluang untuk tersebarnya penyakit kelamin, rusaknya rumah tangga lantaran perselingkuhan, rusaknya keturunan dan keluargapun akan hidup terhormat dan nyaman lantaran hilangnya kekhawatiran atas kasus perselingkuhan.

Dalam Islam nilai mashlahat bukan hanya diambil untuk kepentingan manusia, namun juga harus beriringan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah, hendaknya kemashlahatan yang diambil oleh seorang pemimpin tidak dibenarkan apabila membelakangi aturan Allah yang ada dalam Al-Qur'an, apalagi bertentangan dengan hak-hak Allah, jika seorang pemimpin mengambil keputusan yang dianggap mashlahat bagi masyarakat namun bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah maka hukum atau keputusan tersebut bukanlah suatu kemashlahatan yang hakiki namun menjadi hukum yang bathil, karena mashlahat yang hakiki dicapai apabila tidak menimbulkan sebuah kerusakan dan keingkaran untuk menjalankan amanat dari Allah.

Dari berbagai hal yang penulis telah ungkapkan dalam skripsi ini banyak mengulas tentang hukum rajam, dengan berbagai macam dalil yang menentang dan mempertahankannya semoga manusia bisa melihat bahwa betapa pentingnya kita untuk berpegang teguh pada tali Allah dan Rasulnya. Seperti apa yang terjadi pada kehancuran dan kerusakan yang dibawa oleh modernitas membuat para pemeluk Islam tertipu dan kehilangan akan tongkat dirinya. Sedikit demi sedikit banyak perintah Allah yang di mana manusia telah



abaikan demi kepentingan modernitas, tidak kah hal ini dapat disadari oleh golongan yang menentang pemberlakuan hukum rajam, Indonesia adalah negara beragama yang di mana hukum raja mini terdapat pada ajaran tiap kitab agama masing-masing<sup>34</sup>.

## 2. Aspek Mudharat dalam Hukum Rajam

Seperti yang telah diketahui bahwa dalam penerapan hukum rajam ini akan berdampak pada penghilangan jiwa seseorang. Sementara dalam teori maqâshid al-Syari'ah yang telah banyak dikemukakan oleh para pakar hukum Islam, dikemukakan bahwa pemeliharaan jiwa juga harus diperhatikan. Pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah apakah dalam penerapan hukum rajam itu terkandung maslahat. Sebelum pertanyaan ini diberikan jawabannya, maka adalah penting untuk dikemukakan bahwa pemeliharaan jiwa itu merupakan tuntutan Tuhan dalam setiap pensyari'atan hukum sebagaimana yang telah dijelaskan.

Dalam teori maqashid al-syariah, urutan prioritas mulai dari pemeliharaan agama hingga pemeliharaan harta penting untuk diperhatikan dalam penerapan hukum. Dalam kasus rajam ini, tentu pertanyaan yang akan muncul adalah aspek mana yang mesti dipertahankan, agama atau jiwa. Agaknya, dua aspek inilah yang sangat berkaitan. Jika aspek agama yang diprioritaskan, maka konsekuensinya hukum rajam tetap dilaksanakan sekalipun berakibat pada penghilangan jiwa. Namun, jika mengikuti pendapat yang mendahulukan aspek jiwa, maka hukum rajam tidak dapat dilaksanakan<sup>35</sup>.

Akan tetapi ada hal mendasar yang harus dijawab terlebih dahulu yaitu apakah dengan tidak diterapkannya hukum rajam akan berdampak pada hancurnya

---

<sup>34</sup>Abujamin Rohan, *Pembicaraan di Sekitar Bible dan Qur'an Dalam Segi Isi dan Riwayat Penulisnya* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 30.

<sup>35</sup>Fatah, Syekh Abdul, *Tarikh al-Tasyri al-Islam* (Kairo: Dar al-Ittihad al'Arabi, 1990), h. 40.

agama? Jika jawabannya tidak, maka prioritas kedua yakni menjaga jiwa mesti diperhatikan atas dasar pertimbangan inilah sehingga hukum rajam tidak dapat dilaksanakan. Jika melihat realitas yang terjadi di banyak negara muslim, hampir dapat dipastikan bahwa pelaksanaan hukum rajam ini boleh dikatakan sangat jarang sekali dilaksanakan untuk tidak mengatakan tiada sama sekali. Sebutlah misalnya Mesir yang dalam Undang-undang dasarnya, tahun 1980, ditegaskan bahwa prinsip-prinsip Syari'at Islam dijadikan ukuran utama dalam pembentukan perundang-undangan negara.

Dalam Qanun al-'Uqubat Mesir tahun 1937 yang tetap berlaku sampai sekarang diterangkan perihal hukum bagi orang yang berzina, yaitu hukuman penjara bagi yang telah kawin dan tidak ada sanksi hukum bagi yang belum kawin kecuali jika terdapat unsur pemaksaan. Fenomena ini cukup dijadikan sebagai alasan yang kuat bahwa meskipun hukum rajam itu tidak diterapkan dalam kehidupan umat Islam, nyatanya agama tetap eksis dan tidak hancur<sup>36</sup>.

Oleh sebab itu, maka prioritas kedua yaitu pemeliharaan jiwa menjadi penting untuk diperhatikan. Jika diperhatikan sejumlah ayat al-Qur'an, maka dapat dinyatakan bahwa pemeliharaan jiwa dalam perintah Tuhan dan pelaksanaan hukum sangat diperhatikan. Bukti konkrit tentang hal ini adalah seperti peristiwa Nabi Ibrahim yang diperintahkan oleh Tuhan untuk menyembelih putranya yang kemudian diganti oleh Tuhan sendiri dengan seekor lembu.

Bukti lainnya lagi adalah dalam pelaksanaan hukum qisas di mana Tuhan menganjurkan kepada ahli waris terbunuh agar memaafkan pembunuh dengan konsekuensi pembunuh harus membayar diyat (denda), padahal qisas termasuk

---

<sup>36</sup> Khalaf, Abdul Wahhab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h. 16-17

dalam lingkup hak adami. Dalam ketentuan hukum yang menyangkut hak adami, Tuhan sangat mengharapkan agar pemeliharaan jiwa tetap harus di prioritaskan.

Oleh sebab itu, agaknya tidak seimbang dan setimpal jika hukuman rajam yang nota bene-nya merupakan hak Allah harus diterapkan dengan menghilangkan nyawa seseorang. Ibn Hajar al-Haitami, walaupun ia setuju dengan adanya hukum rajam ini, menyatakan bahwa hak-hak Allah itu di dasarkan pada kemudahan dan hak-hak adami di dasarkan pada kesempitan. Jika logika al-Haitami ini diikuti, maka sebenarnya tidak tepat adanya hukum rajam tersebut karena apa yang terjadi dengan hukum rajam hak Allah jauh lebih berat daripada hak adami seperti dalam qishas.

Keterangan-keterangan dan penjelasan-penjelasan di atas menggiring untuk menyatakan bahwa penerapan hukum rajam agaknya tidak sejalan dengan maqashid al-syari'ah. Karena itu, keberadaan hukum rajam ini masih dapat diperdebatkan. Muhammad Sa'id al-Asymawy secara tegas mengatakan bahwa pendapat ulama yang mengatakan bahwa pezina muhsan itu harus dirajam adalah keliru. Bahkan al-Asmawy mengatakan bahwa tidak ada bukti sejarah yang menunjukkan bahwa Nabi merajam orang berdasarkan kepada ayat al-Qur'an mengenai perzinahan. Nabi pernah merajam orang, tetapi menurut al-Asymawy hal itu berdasarkan pada hukuman yang disebutkan dalam Perjanjian Lama<sup>37</sup>.

---

<sup>37</sup> Al-Ahwani, Ahmad Fu'ad, *Filsafat Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1998), h. 22.

## BAB IV

### STUDI PERBANDINGAN HUKUM RAJAM DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

#### **A. Perbedaan Pendapat dalam Hukuman Rajam Diantara Fuqaha**

Hukum rajam adalah sangsi hukum yang dianggap tidak berprrikemanusiaan oleh kalangan masyarakat, karena bertujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang, dengan jalan melemparinya dengan batu sampai mati. Eksekusi ini dijatuhkan kepada pelaku zina *muhsan*, baik laki-laki maupun perempuan. Seorang pelaku zina *mu.h.san* yaitu: seorang mukallaf, berakal, waras, *baligh*. Ia adalah seorang yang merdeka bukan hamba sahaya, dan ia sudah terikat dalam perkawinan atau sudah pernah merasakan persetubuhan dalam ikatan perkawinan<sup>1</sup>. Hukum rajam memang tidak tercantum dalam al-Qur'an, akan tetapi sebagian fuqaha' setuju dengan hukuman rajam, dengan dasar hadis Nabi sebagai sandaran hukum. Namun sebagian Fuqaha' yang lain menyatakan tidak setuju dengan hukuman rajam, karena mereka menganggap bahwa hadis tersebut tidak cukup sebagai dasar hukum. Oleh karena itu hukuman rajam menjadi pro dan kontra dikalangan fuqaha'. Sebagian fuqaha' yang tidak setuju dengan hukuman rajam adalah khawarij, sebagian ulama'Syi'ah dan sebagian mu'tazilah<sup>2</sup>.

Munculnya perbedaan pandangan terhadap hukuman rajam berpangkal pada: pertama, perbedaan pemahaman atas kandungan hukum pada QS An-Nur

---

<sup>1</sup> Umar Shihab, *Kontekstualisasi Al Qur'an Kajian Tematik Atas Ayat-Ayat Hukum Dalam Al Qur'an* (Jakarta: Penamadani, 2005), h. 438.

<sup>2</sup> Alasan mereka menolak hukum rajam ; *pertama*, Hukum Rajam dianggap paling berat diantara hukum yang ada dalam Islam namun tidak ditetapkan dalam Al Qur'an. *Kedua*, Hukuman bagi hamba sahaya separuh dari orang merdeka, kalau rajam dianggap sebagai hukuman hukuman mati, apa ada hukuman separuh mati. *Ketiga*, hukum dera yang tertera dalam surat an Nur ayat 2 berlaku umum, yakni pezina muhsan dan ghairu muhsan. Sementara hadis Nabi yang menyatakan berlakunya hukum rajam adalah lemah. Lihat, Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), h. 100-102.

ayat 2. Kedua, perbedaan penilaian terhadap sah dan tidaknya penetapan hukuman rajam berdasarkan hadis yang tidak kuat. Ketiga, keyakinan oleh sementara pihak yang berpendapat bahwa hukuman rajam pernah diterapkan oleh Nabi adalah terjadi sebelum turunnya QS An-Nur ayat 2, dan sanksi rajam tersebut tidak berlaku lagi setelah turunnya QS An-Nur ayat 2.

#### 1. Ulama yang Setuju dengan Pemberlakuan Hukum Rajam

Para ulama sepakat bahwa orang yang telah berzina dan tergolong sebagai zina muhsan maka harus dihukum rajam, terutama al- mazahib al- arba'ah (mazhab yang empat) yaitu mazhab hanafi, maliki, syafi'i dan hambali. Dalam Al-qur'an ayat rajam tidak tercantum, namun seperti apa yang telah dibahas di atas dalam kandungan nash Al-qur'an mengenai rajam, sejumlah kitab fiqhi telah menjelaskan bahwa pada mulanya ayat rajam termaktub dalam Al-qur'an, dalam perkembangannya ayat itu dihapuskan namun hukumnya tetap berlaku (*naskh al-rasm wa baqa' al-hukum*) yaitu lafadznya ditiadakan namun hukumnya tetap di berlakukan<sup>3</sup>. Menurut Khalifah Umar bin Khattab bahwasanya dulu ada ayat yang pernah diturunkan dan ayat tersebut berbunyi<sup>4</sup>:

الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَيِّنَةُ تَكْلًا مِنَ اللَّهِ

Terjemahnya:

Laki-laki tua yang berzina dan perempuan tua yang berzina, maka rajamlah secara sekaligus, sebagai balasan dari Allah.

Hal ini ditambahkan oleh An-Nasa'i dalam buku Muhammad Abduh Malik bahwasanya ayat tersebut tepatnya berada dalam surat Al-Ahzab, kemudian dalam Al-Mu'attha juga mencantumkan hadist itu bersumber dari Yahya bin Said dari Ibnu Musayyad. Ayat dan beberapa hadis yang menjadi pegangan para ulama yang sepakat terhadap pemberlakuan hukum rajam. Sedangkan dasar hukuman

<sup>3</sup> Kuliyat Al-Mu'allimin Al-Islamiah, *Al-bayan fi 'Ilmi Ushul al-Fiqh* (Ponorogo: Darussalam Press, 1998), h. 76.

<sup>4</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 47.

rajam yang berasal dari sunnah, maka ada riwayat mutawatir dari Rasulullah saw baik perkataan maupun perbuatan yang menerangkan bahwa Rasulullah saw telah merajam pezina yang *mu.h.san*.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut dan sejarah pemberlakuanannya sampai masa wafatnya Rasulullah saw hukum rajam masi tetap diberlakukan dan dilestarikan sampai pada masa Khalifah Ali bin abi Thalib dan seterusnya, maka dengan adanya sunnah nabawiyyah dan atsar dari para sahabat maka ulama beserta jumhur sepakat bahwasannya hukum rajam adalah perintah Allah dan Rasulnya, yang di mana ini adalah bagian dari syariat Islam yang memang harus dipertahankan. Senada dengan apa yang di sampaikan di atas bahwasanya walaupun ayat terkait masalah hukum rajam tidak kita temukan dalam Al-qur'an namun dahulu ayat tersebut pernah ada.

## 2. Ulama yang Tidak Setuju dengan Pemberlakuan Hukum Rajam

Golongan Khawarij dan Mu'tazilah berpendapat bahwasannya ayat ataupun hadist terkait masalah hukuman bagi pelaku zina mmuhshan yaitu rajam telah dihapuskan oleh ayat QS Annur ayat 2, yaitu:

الرَّأْيِيَّةُ وَالزَّانِيَةُ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka derahlah tiap-tiap seseorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mecegah kamu untuk menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman<sup>5</sup>.

Memang Al-qur'an tidak membedakan antara pezina yang tergolong ghair muhshan dan muhshan. Pertimbangan ini sekalipun ia hadir dengan argumentasi

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: CV. Pustaka Assalam, 2010), h. 488.

yang dipertimbangkan oleh kaum Khawarij dan Azariqah sebagai salah satu argumentasi untuk menolak pemberlakuan hukum rajam<sup>6</sup>.

Dapat dikatakan pendapat kelompok ini bahwa ayat rajam terkait dengan sanksi hukum seperti rajam merupakan fiqhi jinayat Al-qur'an yang pada tingkat pelaksanaannya tidak otomatis bias dijalankan, dalam artian ummat Islam boleh mencari sanksi-sanksi hukum yang paling mungkin dan efektif untuk bagaimana bias membuat jera para pelaku criminal. Bias dengan cara memenjarakan atau yang lainnya. Ibnu zaid pernah mengusulkan agar bagaimana orang yang telah melakukan perzinahan dilarang menikah sampai yang berzina meninggal dunia.

Sebagian ulama, seperti Muhammad Syahrur, berpandangan bahwa hokum potong tangan dan rajam merupakan hukuman maksimal al-hadd al-a'la yang hanya biasa dijalankan ketika sanksi hukum yang lain tidak lagi efektif untuk mengurangi tingkat kriminalitas.

Dengan memperlakukan ayat-ayat jinayat sebagai fiqhi Al-qur'an, maka kaum golongan kedua yang di mana tidak setuju dengan pemberlakuan hukuman rajam berpendapat untuk bagaimana tidak lagi terikat supaya memaksakan penerapan sanksi-sanksi hukum itu seperti secara harfiah disebutkan dalam Al-qur'an. Maka dapat mencari jenis-jenis hukuman yang lain yang lebih relevan dan sesuai dengan konteks keindonesian. Yang penting tujuan dari sanksi-sanksi hukum Islam untuk bagaimana bias membuat jera para pelaku tindak pidana sudah tercapai.

---

<sup>6</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 35

## **B. Analisis Perbandingan terhadap Hukum Rajam**

### **1. Rajam dalam Perspektif Hukum Islam**

Hukuman, di dalam hukum Islam, didasarkan atas tiga sistem; yaitu hudûd, ta'zir, dan qishâsh. Khusus berkenaan dengan hukuman-hukuman yang ditentukan (hudud) terdiri dari pemotongan tangan para pencuri, pecambukan karena menuduh wanita baik-baik berzina, pecambukan bagi pezina, dan pemenjaraan atau hukuman mati bagi perampok. Menurut Muhammad Sa'id al-Asymawi, ini semua adalah hukuman bersyarat yakni, hukuman-hukuman itu tidak akan diberlakukan kecuali jika syarat-syarat umum dan khusus telah terpenuhi. Syarat umum untuk menerapkan hukum tersebut berupa sebuah masyarakat beriman.

Dalam masyarakat tersebut, kita hanya membutuhkan pelaksanaan, saksi-saksi, dan hakim sehingga hukuman akan diterapkan dengan cara yang benar, ketimbang digunakan untuk mendukung atau melawan seseorang, atau di bawah tekanan pemerintah atau atas permintaan penguasa.

Hukuman berzina dalam Al-qur'an sebagai hukuman yang ditetapkan syara' adalah 100 kali cambukan bagi pezina laki-laki dan perempuan. Sedangkan hukuman rajam pertama kali dilakukan oleh nabi Muhammad saw berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam kitab Taurat, sebab dua orang yang dihukum rajam tersebut berasal dari orang Yahudi Madinah. Ada pendapat yang mengatakan bahwa hukum rajam berasal dari ayat yang terdapat pada surat al-Ahzab yang menyatakan bahwa seorang nenek dan kakek yang berzina dikenakan rajam sebagai ketentuan dari Allah. Namun, menurut mereka, teks ayat tersebut telah di-nasakh (dihapus) lafalnya dari Al-qur'an, sedangkan ketetapan hukumnya tetap berlaku. Pendapat itu menegaskan, seharusnya dalam Islam tidak ada nash



yang dihapus yang kandungan hukumnya masih berlaku, terlebih ayat tentang rajam merupakan sesuatu yang krusial.

Keberadaan hukum rajam dalam Islam, salah satu di antaranya, didasarkan pada hadits Umar bin Khathab ra. di mana beliau dalam suatu kesempatan pernah berpidato: Sesungguhnya Allah swt telah mengutus Muhammad saw dengan kebenaran dan telah menurunkan padanya Al-Kitab (Al-qur'an). Maka terdapat ayat rajam pada apa yang diturunkan itu. Kami membacanya, menghafalnya, dan memahaminya.

Oleh karena Rasul pernah merajam kami pun merajam sesudahnya. Khawatir jika telah berlalu zaman, akan muncul orang yang mengatakan bahwa kami tidak menemukan rajam dalam kitab Allah. Sesungguhnya rajam itu hak (kebenaran) dalam kitab Allah atas orang yang berbuat zina, baik itu laki-laki maupun perempuan, jika muhshan dan adanya bukti, atau hamil, ataupun pengakuan.” Menyikapi pernyataan Umar di atas, ada beberapa kemungkinan interpretasi yang dapat diberikan. Pertama, bahwa hukum rajam itu ada dalam ajaran Islam. Rasulullah maupun khalifah Umar sendiri pernah menerapkan hukum rajam itu. Kekhawatiran Umar terhadap kemungkinan adanya pendapat yang meragukan keberadaan hukum rajam itu merupakan indikasi yang kuat bahwa hukum rajam itu ada dan terus berlaku sepanjang zaman. Agaknya pendapat inilah yang dipegang oleh jumhur ulama. Kedua, bahwa memang benar hukum rajam itu pernah ada dalam ajaran Islam dan baik Rasul maupun Umar sendiri pernah melakukannya<sup>7</sup>.

Akan tetapi hal itu tidak secara otomatis bahwa hukum rajam itu berlaku terus-menerus sepanjang zaman. Kekhawatiran Umar tersebut harus dipahami dalam konteks pernah adanya ayat dan hukum rajam itu dalam al-Qur'an yang

---

<sup>7</sup> Mahmud syaltut, *Al- Islam 'aqidah wa syari'ah* (Mesir: Dar al-Qalam 1966), h. 12.

kemudian dinasakh. Dan bentuk penasakhan ayat rajam ini sendiri ternyata masih menjadi perdebatan dikalangan ulama. Ada ulama yang mengatakan bahwa sungguh pun ayatnya telah dinasakh akan tetapi hukumnya tetap berlaku. Adapula ulama yang tidak setuju dengan pendapat seperti ini. Ketidak setujuan mereka itu karena informasi-informasi yang menjelaskannya adalah hadits-hadits ahad.

Dalam hal memastikan atas turunnya ayat Al-qur'an beserta nasakhnya tidak dibenarkan dengan menggunakan hadis ahad. Ada pendapat yang mengatakan bahwa ayat dan hukum itu harus bersifat *talazzum* (tetap), karena ayat sebagai dalil adanya hukum. Maka ketika ayat tersebut dinasakh, hukumnya pun berarti dinasakh, dan jika tidak maka manusia tetap akan dibawa dalam kebingungan. Dan jika pendapat ini disetujui berarti hukum rajam itu telah dihapuskan oleh Al-qur'an sendiri. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa keberadaan ayat rajam dalam bentuk bacaannya dihapuskan akan tetapi hukumnya masih menjadi perdebatan di kalangan ulama.

Tentu saja bagi ulama yang setuju dan mengakuinya akan tetap menerapkan hukum rajam, dan demikian pula sebaliknya. Kenyataan ini menunjukkan pula bahwa dilihat dari perspektif ini, hukum rajam masih bersifat zhannî, padahal hukuman hudud harus bersifat qath'î<sup>8</sup>.

Oleh sebab itu hal ini masih bisa diperdebatkan. Jika kemudian dinyatakan bahwa hukum rajam itu ditetapkan oleh hadits-hadits, maka persoalan yang muncul kemudian apakah hadits-hadits yang berhubungan dengan hukum rajam itu dikemukakan sebelum ayat rajam itu dinasakh atau sesudahnya.

---

<sup>8</sup> Yahya, Mukhtar, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam* (Bandung: Al-Ma'arif, 1986), h. 45.

## 2. Rajam dalam Perspektif Hukum Positif

Dalam hukum positif sangat jelas perbedaan antara hukum Islam dan hukum yang berlaku saat ini di Indonesia khususnya berkaitan dengan sanksi bagi pelaku zina *muhshan*, Menurut KUHP tidak semua pelaku zina diancam dengan hukuman pidana. Misalnya pasal 284 ayat (1) dan (2) menetapkan ancaman pidana penjara paling lama 9 bulan bagi pria dan wanita yang melakukan zina, padahal seorang atau keduanya telah kawin, dan dalam pasal 27 KUH Perdata (BW) berlaku baginya.

Ini bisa diartikan bahwa pria dan wanita yang telah melakukan zina dan belum kawin, maka mereka tidak terkena sanksi hukuman tersebut di atas. Dan tidak pula dapat dikenakan hukuman bagi keduanya asalkan telah dewasa dan suka sama suka (tidak ada unsur paksaan), kecuali dengan wanitanya yang belum dewasa dapat dikenakan sanksi, hal ini diatur dalam KUHP pasal 285 dan 287 ayat (1). Sedangkan menurut hukum pidana Islam, semua pelaku zina pria dan wanita dapat dikenakan had, yaitu hukuman dera bagi yang belum kawin, dengan catatan bahwasannya dera ini tidak boleh berakibat fatal bagi yang dikenai hukuman.

Selanjutnya dalam KUHP, perbuatan zina hanya dapat dituntut atas pengaduan suami maupun istri yang tercemar (pasal 284 ayat 2), sedangkan Islam tidak memandang zina sebagai *klach delict* (hanya bisa dituntut) atas pengaduan yang bersangkutan. Hukum positif KUHP dalam menyikapi masalah perzinahan, ada berbagai variasi hukuman (klasifikasi). Dengan penerapan hukuman yang berbeda-beda yang tertuang dalam KUHP pasal 284 ayat (1) dan (2), pasal 285, 286 dan 287 ayat (1). Sedangkan dalam Islam itu sendiri menetapkan hukuman dera jika pelaku zina yang belum kawin dan hukuman rajam jika telah kawin (*muhshan*).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dalam bagian terakhir ini penulis mencoba untuk bagaimana bisa menyimpulkan beberapa uraian di atas bahwa hukum rajam adalah hukum Allah yang harus dilestarikan, hukum rajam diberlakukan dan diatur dalam hukum Islam dengan mengadopsi hukum dari ajaran agama samawi sebelum Islam. Hukum rajam adalah hukuman siksa badan, yang di mana seseorang di taman sampai leher yang kemudian dikenakan pada pelaku zina muhsan karena pelaku telah menodai dan tidak menghormati keabsahan dan nilai dari pada pernikahan itu sendiri. Hukum rajam sangat mengandung nilai mashlahat yang sangat rasional untuk bagaimana terhindarnya seseorang dari banyak kerusakan dan kemudharatan, oleh sebab itu maka sudah menjadi kewajiban atas segenap manusia untuk menaruh perhatian yang cukup mengenai ketaatan terhadap hukum Allah ketimbang tunduk patuh dan taat terhadap hukum manusia itu sendiri.
2. Berdasarkan rasio hakiki sebuah mahluk hendaknya bersyukur dan berbakti pada Allah yang telah menciptakannya. Hukum Allah bukan hanya membuat manusia senang di dunia melainkan menjamin pula kesenangan di akhirat, oleh sebab itu hukum Islam pun terdapat HAM yang di mana tercipta jauh sebelum HAM barat itu dilahirkan, namun dalam HAM menurut hukum Islam bukan hanya terdapat sebuah hak asasi manusia (HAM) tapi juga terdapat kewajiban asasi manusia, yang mana kewajiban harus terpenuhi lebih dahulu untuk mendapatkan sebuah hak. Terkait keputusan HAM menurut barat dengan penghapusan terhadap hukuman mati dan hukuman yang

menyiksa sangat bersebrangan dengan produk hukum Islam terlebih lagi hukum rajam yang mengandung penyiksaan dan kematian. Namun penulis beranggapan bahwa hukum tersebut batal secara hukum Islam, pelestarian hukuman rajam adalah bagian dari amanat yang diberikan oleh Allah terhadap ummatnya yang menyakini kittabnya, karena hukum rajam telah tertera pada kitab Yahudi, Nasrani, dan sunnah nabi. Maka tentu suatu langkah berbakti dan memegang amanat kepada tuhan yang kita pilih karena dia dzat yang maha menjamin atas segala kelangsungan kehidupan manusia.

3. Dalam perkembangan modernitas yang mengadopsi tentang *Declaration Universal Of Human Rights* (DUHAM) atau bisa disebut dengan Hak Asasi Manusia (HAM) hukum rajam dianggap sebagai hukuman yang sangat menyiksa, kejam dan tidak berperikemanusiaan (DUHAM pasal 7, konvensi anti penyiksaan pasal 1 ayat (1), konvensi hak sipil dan politik pasal 6, UUD 1945, DUHAM pasal 3 mengenai hak hidup adalah hak asasi) melanggar HAM dan dikecam serta mesti dihapus pemberlakuaanya pada setiap Negara yang menganut HAM.

Berkaitan dengan hal ini penulis menganggap mesti menyerahkan permasalahan pada sang pencipta hukum lewat Al-qur'an dan sunnah, yang secara hirarki mempunyai kedudukan tertinggi. Hukum rajam bukanlah hukum yang baru akan tetapi sudah ada semenjak agam Yahudi dan Nasrani berkembang dan dilestarikan oleh hukum Islam. Olehnya itu penulis lebih berpacu kepada pelestarian hukum rajam sesuai aturan hukum Islam dan sebagai amanat dari Allah. Dengan itu penulis menyimpulkan bahwa hukum Allah jauh lebih kuat dan relevan dibanding hukum buatan akal manusia yang di mana bisa kita anggap menghilangkan nilai ketaatannya terhadap Allah, Rasul dan agama. Selain itu hukum rajam juga mendekatkan masyarakat pada tercapainya kemashlahatan

karena daya hukuman yang bersifat dan bertujuan mencegah sehingga mampu meminimalisir bahkan mencegah segala kerusakan dan mudharat disbanding hukuman Sembilan bulan dalam hukum Indonesia KUHP pasal 284 ayat (1) seperti apa yang sudah terjadi pada zaman kita ini.

Demikian hukum rajam mempunyai sisi dan manfaat yang lebih relevan kemaslahatannya bagi masyarakat disbanding hukum yang lain. Inilah berbagai kesimpulan-kesimpulan yang dapat penulis paparkan dari permasalahan Rajam dalam perspektif Hak Asasi Manusia (Studi analisis perbandingan hukum Islam dan hukum positif).

## **B. Implikasi Penelitian**

Setelah penulis memafarkan hal-hal yang berkaitan dengan hukum rajam menurut hukum Islam dan HAM, selanjutnya penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi kaum intelek dan akademisi, penulis hanya mengkaji masalah hukum rajam yang diatur dalam hukum Islam dan penetangnya dalam konsep hak asasi manusia (HAM) menurut barat, namun jauh dari itu masih banyak hukum Islam yang bertentangan dengan HAM barat seperti hukum cambuk dan sanksi pidana lainnya. Oleh karena itu penulis mengharapkan ada peneliti-peneliti yang lain yang mengkaji masalah hukum Islam yang lain yang di mana di anggap bertentangan dengan HAM, agar masyarakat dapat membandingkan antara hukum Islam dan HAM tentang hukum yang bertentangan.
2. Para cendekiawan muslim, dengan adanya perbedaan pendapat di dalam tubuh Islam itu sendiri mengenai kewajiban melaksanakan hukum rajam atau tidak, maka perlu dikaji kembali dali-dalil tentang pelaksanaan hukum rajam sehingga bisa memperluas wawasan terkait hukum rajam.

3. Bagi pemeluk HAM internasional termasuk NKRI, oleh karena konsep HAM itu sendiri dibuat oleh manusia yang di mana kita ketahui bahwa manusia rentan memiliki kepentingan sepihak, maka penulis melihat perlu adanya pengkajian ulang atau biasa disebut uji materi terkait hal-hal yang bertentangan dengan konsep keagamaan khususnya hukum rajam, karena kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan agar hukum tersebut bisa memberikan kemashlahatan bagi seluruh golongan.

Begitu pentingnya pemahaman tentang hukum rajam yang diatur dalam Islam dan HAM anti penyiksaan dan hukuman mati, sehingga penulis beranggapan bahwasanya perlu adanya kitab-kitab atau buku-buku yang membahas sekaligus kedua permasalahan yang penulis paparkan dengan harapan bisa mempermudah proses pemahaman para tenaga pengajar dan mahasiswa tentang hukum rajam dan ilmu-ilmu lainnya.

## Daftar Pustaka

- Abdurrahman. *Tindak pidana Dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Al-‘Atsqalani, Ibnu Hajar (Ed), Nawawi, Mahmud Amin. *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, Surabaya: Maktabah Shahabat Ilmu, 1378M.
- Al-Ahwani, Ahmad Fu’ad, *Filsafat Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1998.
- Ali, Achmad, *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya*, Cetakan Kedua; Ciawi-Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Al-Kitab, Jakarta: Lembaga Percetakan Al-kitab Indonesia, 1995.
- Arinanto, Satya, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Cetakan Kedua; Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, 2005.
- Asse, Ambo, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Nabi saw*, Makssar: Alauddin University Press, 2012.
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, di tetapkan oleh majelis Umum PBB, tanggal 10 desember 1948.
- Departemen Agama R.I, *Al- Qur’an dan Terjemahnya*, Surabaya: CV. Pustaka Assalam, 2010.
- Effendi, Mansyur, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005.
- Fatah, Svek Abdul, *Tarikh al-Tasyri al-Islam*, Kairo: Dar al-Ittihad al’Arabi, 1990.
- Hanafi, ahmad. *Asas-asas hukum pidana Islam*, Cetakan Kelima; Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Imam Syaukani, A. Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2008.
- Khalaf. Abdul Wahhab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Kosasih, Ahmad. *HAM Dalam Perspektif Islam menyikap Persamaan dan Perbedaan antara Islam dan HAM*, Cetakan Pertama; Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.



Kurniati, *Ham Dalam Perspektif Syari'ah dan Deklarasi PBB*, Makassar: Alauddin University Press, 2012.

Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

Majid, Nurcholis. *Islam Doktrin Peradaban*, Jakarta: Paramadin, 1995.

Malik, Muhammad Abduh. *Perilaku Zina pandangan Hukum Islam dan KUHP*, Jakarta: Bulan Bintang dan satelit Buana, 2003.

Mohammad Monib, Islah Bahrawi, *Islam dan Hak asasi manusia Dalam Pandangan Nurcholish Madjid*, Jakarta : Gramedia pustaka utama, 2011.

Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasi dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2005.

Muslich, ahmad wardi. *Hukum pidana islam*, Jakarta : sinar grafika, 2005.

Salam, abdul jalil. *Polemik hukuman mati di Indonesia*, Jakarta : badan litbang dan diklat kementrian agama RI, 2010.

Santoso, topo. *Membumikan hukum pidana islam*, Jakarta: bulan bintang 1975.

Sastrawidjaja, sofjan. *Hukum pidana; asas hukum pidana sampai dengan alasan peniadaan pidana*, bandung: Amrico, 1995.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama **AHMAD SYARIF**, lahir di Pulau Balang Lompo, Tanggal 13 Juni 1995, bertempat tinggal di Pulau Balang Caddi kab, Pangkep. Penulis adalah anak pertama dari lima bersaudara pasangan **ABD SYAFA** dan **ASFURIAH**. Penulis menempuh jenjang pendidikan dimulai dari pendidikan SDN 26 Pulau Balang Lompo (2001-2006), Kemudian melanjutkan pendidikan di MTS PUTRA Tonronnge

DDI-AD Mangkoso (2007-2009), setelah itu penulis lanjut di M.A PUTRA Tonronnge DDI-AD Mangkoso 2010-2012), kemudian melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan lulus di jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Alauddin Makassar (2012-2017).